

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

**Jl. Sultan Hadiwijaya No.44 Demak Telp/fax.0291.685934
website : www.dinkes.demakkab.go.id
email : dinkes@dinkes.demakkab.go.id**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023. LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Kesehatan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK

dr. ALI MAIMUN, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710410 200212 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Kabupaten Demak merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 - 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dan memuat pernyataan Visi, pernyataan Misi yang diemban, dan tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2026. Pada Tahun 2023 terdapat 5 indikator sasaran yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dengan Indikator persentase keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti yang memiliki target tahun 2023 sebesar 100%; Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan dengan indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai target, dengan target sebesar 100%; Menurunnya Angka Kematian yang memiliki tiga indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dengan target 75,54 Tahun, Angka Kematian Bayi (AKB) dengan target 4,9, Angka Kematian Ibu (AKI) dengan Target 98; Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya yang memiliki target 96,6%; dan Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Indikator Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri dengan target 70,28%. 1 program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%, dan 4 program urusan pemerintahan wajib yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Target 100%; Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan dengan target 100%; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan target 100%; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan target 90%; serta 20 kegiatan, dan 92 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupten Demak Pada Tahun 2023 yang tersedia sebesar Rp. 538.152.510.670,09,-

Pencapaian Sasaran

Nilai Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari 9 indikator Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 semuanya dalam Kategori Sangat Tinggi dengan Skala nilai capaian kinerja $91 \leq 100$. Indikator sasaran meliputi Indeks kepuasan masyarakat dengan relisasi kinerja 90,54; Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan realisasi 100%; Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi 83,86; Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target dengan realisasi 88,89 dari 9 Indikator terdapat satu Indikator yang belum tercapai (Nilai SAKIP) sehingga capaian tidak 100%; Angka Harapan Hidup (AHH) dengan realisasi 75,60; Angka Kematian Bayi (AKB) dengan realisasi 3,42; Angka Kematian Ibu (AKI) dengan realisasi 63,88; Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya yang telah mencapai 100%, dan Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri dengan realisasi sebesar 83%. Dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ini terdapat beberapa hambatan-hambatan diantaranya adalah belum optimalnya pelayanan

KIA, Masih adanya kasus kekurangan gizi (stunting, gizi kurang, balita kurus, ibu hamil KEK), kurangnya tenaga dan kualitas bidan dan tenaga medis PONEC, serta masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak; Belum Optimalnya Penyakit Menular dan penanggulangan penyakit tidak menular; Masih adanya desa yang belum paham mengenai Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sehingga pihak desa masih belum melaksanakan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) secara mandiri, masih bergantung pada Puskesmas; Belum semua klinik siap untuk melaksanakan akreditasi karena masih kurang dalam penataan tata grahanya; Kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga penunjang urusan kesehatan; Masih kurangnya Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk; Masih kurang optimalnya budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang disebabkan oleh karena Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.

Realisasi dan Capaian Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Pada Tahun 2023 yang tersedia adalah sebesar Rp. 538.152.510.670,09,-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 513.793.540.225,00 atau sebesar 95,47%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... II

IKHTISAR EKSEKUTIF III

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL 1

DAFTAR GRAFIK..... 1

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2

1.2. Tugas dan fungsi..... 5

1.3. Isu-isu strategis 5

1.4. Keadaan pegawai dan sarpras..... 5

1.5. Keuangan 9

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

2.1. PERENCANAAN STATEGIS 12

2.1.1. Visi Dan Misi Kabupaten Demak 12

2.1.2. Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan 15

2.2. Indikator Kinerja Utama..... 24

2.3. Rencana Kinerja Tahunan..... 28

2.4. Perjanjian Kinerja 42

2.5. Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis 44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 53

3.1 CAPAIAN KINERJA 53

3.2 ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 54

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023, 2022 terhadap Target Akhir Renstra Th.2026 54

3.2.2 Analisis Penyebab Kegagalan / Keberhasilan dan Solusi Yang Telah Dilakukan 68

3.2.3 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya..... 73

3.3 REALISASI ANGGARAN 91

BAB IV PENUTUP 107

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN 107

4.2 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG 107

LAMPIRAN 109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Ketenagaan Dinas Kesehatan Tahun 2023 5

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... 7

Tabel 1. 3 Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023 8

Tabel 2. 1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023..... 15

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis, Program, Dan Kegiatan..... 16

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 25

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023 29

Tabel 2. 5 Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023..... 42

Tabel 2. 6 Definisi Operasional Dan Formulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 43

Tabel 2. 7 Program/ Kegiatan Dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten
Demak Tahun 2023..... 45

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 53

Tabel 3. 2 Target Kinerja Sasaran Tahun 2023..... 54

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 55

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes Kab. Demak Tahun 2022 Dan 2023..... 56

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja Dinkes Kab. Demak Dengan Dinkes Provinsi 56

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dinkes Kab. Demak
Tahun 2022 Dan 2023 57

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Nilai Sakip Dinkes Kab. Demak Tahun 2022 Dan 2023 58

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Yang
Mencapai Target Tahun 2022 Dan Tahun 2023 60

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Ahh Tahun 2022 Dan Tahun 2023 61

Tabel 3. 10 Angka Kematian Bayi (Akbi) Dinkes Kab. Demak Tahun 2023 63

Tabel 3. 11 Angka Kematian Ibu (Aki) Dinkes Kab. Demak Tahun 2023 65

Tabel 3. 12 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Dan Rujukan Terakreditasi Minimal Madya
Tahun 2022 Dan 2023 66

Tabel 3. 13 Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Tahun 2022 Dan 2023..... 67

Tabel 3. 14 Kebijakan Strategis Yang Diterapkan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023 71

Tabel 3. 15 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
Tahun 2023 74

Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan S/D Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 76

Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023 91

Tabel 3. 18 Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Tahun 2023..... 92

Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023... 100

DAFTAR GRAFIK

grafik 3. 1 Nilai Sakip Dinkes Tahun 2020-2023.....58

Grafik 3. 2 Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2023 59

Grafik 3. 3 Angka Harpan Hidup (AHH) Prov. Jateng Tahun 2023.....61

Grafik 3. 4 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2023 64

Grafik 3. 5 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2023.....65

Grafik 3. 6 Capaian Desa Siaga Aktif Mandiri Tahun 2023 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terletak di jalan Sultan Hadiwijaya No. 44 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan dibantu oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), Laboratorium Kesehatan (Labkesda), RSUD Sunan Kalijaga, dan RSUD Sultan Fatah.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- 3) Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

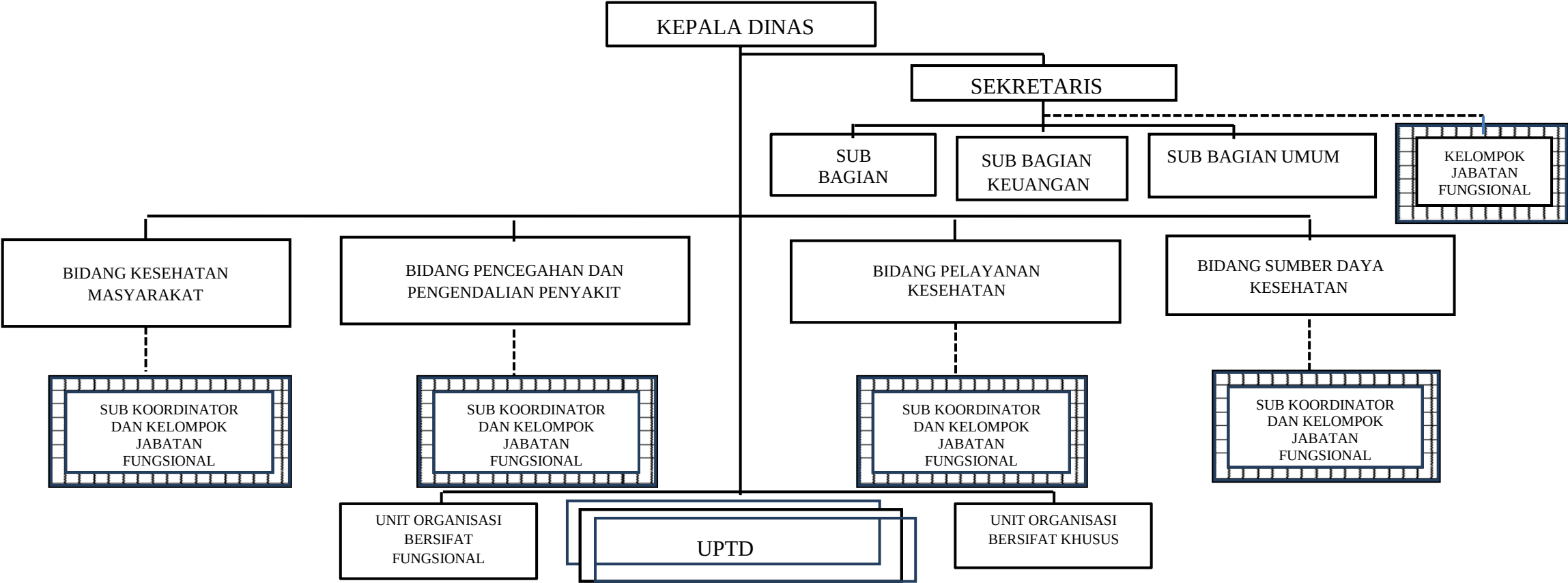
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, yang membawahkan Subbagian Program; Subbagian Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahkan Sub Koordinator Keluarga dan Gizi; Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang membawahkan Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi; Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- 5) Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahkan Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional; Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan Sub Koordinator Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

- 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang membawahkan Sub Koordinator Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Sub Koordinator Manajemen Informasi Kesehatan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 8) Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- 9) Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan

Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terdiri dari satu Sekretariat dan empat bidang, kelompok jabatan fungsional serta UPTD. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagaimana tersaji pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1. 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK



1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- 3) Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang bersifat sangat mendesak dan harus segera diselesaikan dalam tahun perencanaan. Berdasarkan hasil telaah terhadap visi-misi Bupati Demak, telaah terhadap renstra kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dapat dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagai berikut:

- 1) Belum Optimalnya pelayanan publik bidang kesehatan;
- 2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 3) Tingginya angka kesakitan dan angka kematian;
- 4) Masih adanya kasus kekurangan gizi;
- 5) Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- 6) Rendahnya budaya gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

1.4. KEADAAN PEGAWAI DAN SARPRAS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak didukung oleh sumber daya manusia tersaji pada tabel 1.1 dan sarana dan prasarana sebagaimana tersaji pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Ketenagaan Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
A	Dinas Kesehatan									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	1	2	3	0	0	0	1	2	3
3	SMA Sederajat	4	2	6	11	4	15	15	6	21
4	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
5	D3	1	2	3	8	12	20	9	14	23
6	S1/D4	8	32	40	6	10	16	14	42	56
7	S2	7	9	16	0	0	0	7	9	16
8	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	21	47	68	25	26	51	46	73	119
B	Puskesmas (27 Puskesmas)									
1	SD	1	1	2	3	6	9	4	7	11
2	SMP Sederajat	7	1	8	9	5	14	16	6	22
3	SMA Sederajat	13	28	41	42	37	79	55	65	120
4	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D3	35	248	283	51	258	309	86	506	592
6	S1/D4	85	443	528	17	86	103	102	529	631
7	S2	11	34	45	0	0	0	11	34	45
8	S3	0	0	0	1	3	4	1	3	4
	Jumlah	152	755	907	123	395	518	275	1150	1425
C	RSUD Sultan Fatah									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	0	2	2	54	41	95	54	43	97
4	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D3	3	31	34	0	0	0	3	31	34
6	S1/D4	19	41	60	0	42	125	19	83	102
7	S2	11	13	24	0	21	56	11	34	45
8	S3	0	1	1	10	4	14	10	5	15
	Jumlah	33	88	121	64	108	290	97	196	293
D	RSUD Sunan Kalijaga									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	1	1	2	1	0	1	2	1	3
3	SMA Sederajat	9	15	24	73	60	133	82	75	157
4	D1	0	1	1	2	2	4	2	3	5
5	D3	14	52	66	70	183	253	84	235	319
6	S1/D4	25	95	120	67	110	177	92	205	297
7	S2	12	14	26	10	15	25	22	29	51
8	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	61	178	239	223	370	593	284	548	832
E	Laboratorium Kesehatan									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	1	0	1	2	0	2	3	0	3
4	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D3	0	2	2	3	1	4	3	3	6
6	S1/D4	2	0	2	0	1	1	2	1	3
7	S2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	3	2	5	5	2	7	8	4	12
TOTAL SDM		270	1070	1340	440	901	1459	710	1971	2681

Dari jumlah pegawai sebanyak 2.681 terdiri dari ASN sebanyak 1.340 orang (49,98%) dengan jumlah Laki-laki 270 orang (20,14%) dan perempuan 1.070 orang (79,85%). Adapun pegawai Non ASN sebanyak 1.459 orang (54,44%) berstatus honorer Daerah dan Kontrak BLUD, dengan jumlah laki-laki sebanyak 440 orang (30,16%) dan perempuan sebanyak 901 orang (61,75%). Pegawai berstatus pendidikan dasar (SD-SMP derajat) sebanyak 39 orang (1,45%), pegawai berstatus SMA sebanyak 398 orang (14,84%) dan pegawai berstatus pendidikan Diploma D1 sejumlah 5 orang (0,19%), pegawai berstatus pendidikan Diploma D3 sejumlah 974 orang (36,32%), pegawai berstatus Sarjana atau strata sarjana (S1 dan D4) sejumlah 1.089 orang (40,62%), pegawai berstatus pasca sarjana (S2) sejumlah 157 orang (5,85 %), dan pegawai berstatus pasca sarjana (S3) sejumlah 19 orang (0,71%). Kemudian dari total pegawai ASN berdasarkan pangkat golongan dapat di lihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
A.	Dinas Kesehatan			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	3	8	11
3	Golongan III	9	20	29
4	Golongan IV	5	7	12
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
5	Golongan IX	3	12	15
6	Golongan X	1	0	1
	Jumlah	21	47	68
B.	Puskesmas (27 Puskesmas)			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	1	1	2
2	Golongan II	23	91	114
3	Golongan III	96	516	612
4	Golongan IV	23	94	117
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
5	Golongan VII	3	28	31
6	Golongan IX	4	21	25
7	Golongan X	2	4	6
	Jumlah	152	755	907
C.	Rumah Sakit Sultan Fatah			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	19	21

No	Golongan	L	P	Jumlah
3	Golongan III	18	52	70
4	Golongan IV	12	11	23
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
5	Golongan VII	0	3	3
6	Golongan IX	1	0	1
7	Golongan X	0	3	3
	Jumlah	33	88	121
D.	Rumah Sakit Sunan Kalijaga			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	15	37	52
3	Golongan III	23	103	126
4	Golongan IV	20	34	54
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
5	Golongan VII	2	1	3
6	Golongan IX	0	1	1
7	Golongan X	1	2	3
	Jumlah	61	178	239
E.	Laboratorium Kesehatan			
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	1	0	1
3	Golongan III	2	2	4
4	Golongan IV	0	0	0
	Jumlah	3	2	5
	TOTAL SDM	270	1070	1340

Dinas Kesehatan memiliki sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Demak terlihat dalam tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 3
Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan
Kabupaten Demak Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat
1.	Puskesmas Rawat Inap	15 unit	15	0	0	0
2.	Puskesmas Non Rawat Inap	12 unit	12	0	0	0
3.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	45 unit	18	0	15	12
4.	Poskesdes	210 unit	210	0	0	0
5.	Rumah Sakit Umum Daerah	2 unit	2	0	0	0
6.	Rumah Sakit Umum Swasta	3 unit	3	0	0	0
7.	Laboratorium Kesehatan	3 unit	3	0	0	0

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat
	(Pemda dan swasta)					
8.	Klinik Pratama	48 unit	48	0	0	0
9.	Klinik Utama	1 unit	1	0	0	0
10.	Ambulance	60 unit	53	5	0	2
	PSC 119	4 unit	4	0	0	0
	Puskesmas	47 Unit	41	4	0	2
	RSUD Sultan Fatah	3 Unit	3	0	0	0
	RSUD Sunan Kalijaga	6 Unit	5	1	0	0
11.	Mobil Puskesmas Keliling	18 unit	114	1	0	4
12.	Mobil jenazah	4 unit	4	0	0	0
	PSC 119	1 unit	1	0	0	0
	RSUD Sultan Fatah	1 unit	1	0	0	0
	RSUD Sunan Kalijaga	2 unit	2	0	0	0
13.	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian	168 unit	168	0	0	0
	Industri farmasi	1 unit	1	0	0	0
	Pedagang besar farmasi	3 unit	3	0	0	0
	Apotek (Pemkab)	9 unit	9	0	0	0
	Apotek (Swasta)	151 unit	151	0	0	0
	Toko Obat,	1 unit	1	0	0	0
	Optikal	4 unit	4	0	0	0
	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 unit	1	0	0	0

1.5. KEUANGAN

Pada Tahun 2023 terdapat 3 indikator sasaran, 1 program penunjang, dan 4 program urusan pemerintahan wajib, 20 kegiatan, dan 92 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupten Demak Pada Tahun 2023 yang tersedia sebesar Rp. 538.152.510.670,09,-.

Dinas Kesehatan memiliki beberapa Aset, Jumlah Aset yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 29.105.545.121,17 yang terdiri aset lancar, aset tetap serta aset lainnya.

1. Aset lancar :

Persediaan tercatat sebesar Rp. 6.615.263.006,53:

- 1) Kas dan Setara Kas Rp. 0,00
- 2) Piutang Rp. 0,00
- 3) Penyisihan Piutang Rp. 0,00
- 4) Beban dibayar dimuka Rp. 0,00
- 5) Persediaan Rp. 6.615.263.006,53

2. Aset Tetap :

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2023 mencatat aset tetap sebesar Rp 28.268.636.121,02

- 1) Aset Tanah sebesar Rp. 511.800.000,00
- 2) Aset Peralatan dan Mesin Rp. 28.268.636.121,02
- 3) Aset Gedung dan Bangunan Rp. 15.263.059.187,64
- 4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 709.553.870
- 5) Aset tetap Lainnya Rp. 0,00
- 6) Kontruksi dalam Pengerjaan Rp. 0,00
- 7) Akumulasi Penyusutan Rp. 22.794.948.689,02

3. Aset lainnya :

- 1) Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa software dan kajian Rp. 1.103.905.200,00
- 2) Aset Lain-lain Rp. 0,00

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai dan Sarpras
- 1.5. Keuangan
- 1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN

- 2.1. Perencanaan Stategis/ Hubungan keterkaitan Visi, misi,tujuan,sasaran,strategi dan kebijakan, Program dan kegiatan (Penjenjangan Kinerja)
 - 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Strategi, Program, dan Kegiatan
- 2.2. Indikator Kinerja Utama
- 2.3. Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4. Perjanjian Kinerja
- 2.5. Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

3.2. Analisis Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023, 2022 terhadap Target Akhir Renstra Th.2026

3.2.2. Analisis Penyebab Kegagalan / Keberhasilan dan Solusi Yang Telah Dilakukan

3.2.3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya

3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang telah disusun. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Demak merupakan sebuah komitmen dalam mendukung visi dan misi pemerintah kabupaten Demak.

2.1.1. Visi Dan Misi Kabupaten Demak

1. Visi

Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi Kabupaten Demak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah :

Demak Bermartabat, Maju, dan Sejahtera

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kabupaten Demak yang Bermartabat

Martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

b. Kabupaten Demak yang Maju

Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

c. Kabupaten Demak yang Sejahtera

Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 3 rumusan sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan pertama dari misi pertama Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilihat dari indikator indeks reformasi birokrasi sebesar 76,99 yang akan dicapai akhir periode pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah dan tatanan masyarakat diwujudkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP Daerah sebesar 76,95; Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 4,001; Indeks Sistem Merit sebesar 0,810 yang dicapai pada tahun 2026.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks SPBE sebesar 3,850 yang akan dicapai di tahun 2026.

2. Tujuan 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan kedua dari misi kedua Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk mengukur Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan indikator IPM sebesar 75,06 yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021-2026. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan aset yang bisa dikembangkan baik dari bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam mewujudkan misi ke 2, upaya kualitas dan daya saing manusia, diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai cerminan dari sikap kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem Demak.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator Indeks Pendidikan sebesar 0,660 yang akan dicapai pada tahun 2026
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan sebesar 0,855 yang akan dicapai pada tahun 2026
 - c. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran sebesar 0,750 yang akan dicapai pada tahun 2026
 - d. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) sebesar 92,38 yang akan dicapai pada tahun 2026.
 - e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,34 dan Indeks Resiko Bencana sebesar 100,12 yang akan dicapai pada tahun 2026
3. Tujuan 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Tujuan ketiga dari misi ketiga Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dengan indikator LPE sebesar 4,66-5,61% dan indikator Tingkat

Kemiskinan sebesar 9,32-11,40% yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan RPJMD tahun 2021-2026. Sektor yang menggerakkan perekonomian Kabupaten Demak adalah sektor pertanian dalam arti luas, perindustrian serta perdagangan.

- a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal dengan indikator LPE kategori Industri Pengolahan sebesar 3,85-5,65 % dan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,50-2,50 % yang akan dicapai pada tahun 2026.
- b. Meningkatnya investasi daerah dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 7,00 % yang akan dicapai pada tahun 2026.
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata dengan indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata sebesar 20,00 yang akan dicapai pada tahun 2026.
- d. Menurunnya jumlah pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran sebesar 6,05-6,89 % yang akan dicapai pada tahun 2026. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan indikator Indeks Gini sebesar 0,261-0,289 yang akan dicapai di tahun 2026.

2.1.2. Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Kesehatan. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Kesehatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
			Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target
3.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 1. Menurunnya Angka Kematian	Angka Harapan Hidup
			Angka Kematian Bayi (AKB)
			Angka Kematian Ibu (AKI)
		Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya
		Sasaran 3. Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri

2.1.3. Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan

Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten demak pada tahun 2023 dilaksanakan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
MENINGKATNYA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI DINAS KESEHATAN YANG DITINDAKLANJUTI
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Sasaran 1. MENURUNYA ANGKA KEMATIAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan
	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan
	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melakukan pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penanganan gangguan jiwa dan Napza
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan
	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin Operasional
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Sasaran 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN BERKOMPETENSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Nakes Mendapat Rekomendasi Ijin Praktik
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SERTA SARANA PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN SESUAI KETENTUAN
	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan Dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan Dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT
	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
Sasaran 3. MENINGKATNYA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS (BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup

Sasaran Strategis	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
		Bersih Dan Sehat
	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Mandiri
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kenerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak memiliki sembilan indikator. Pada Tahun 2023 terjadi perubahan target pada dua Indikator IKU yaitu pada Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya yang semula memiliki target 93,1% menjadi 96,6%. Indikator Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri yang semula memiliki target sebesar 45,5% berubah menjadi 70,28%. Untuk rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
						2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dengan formulasi perhitungan yaitu total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	Angka	89,00	89,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah pemberian informasi terhadap jumlah Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan oleh masyarakat terkait Pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
						2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Perolehan nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP	Angka	82,23	83,53	83,93	84,33	84,73	85,13	85,53	85,53
		Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.	Tahun	75,4	75,27	75,50	75,54	75,58	75,62	75,66	75,66
		Sasaran 1. Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	Banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	Angka	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,7	4,7

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA
						2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup	Angka	57,59	100	99	98	97	96	95	95
		Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan adalah tempat memperoleh pelayanan kesehatan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya oleh lembaga akreditasi Nasional.	%	93,1	93,1	93,1	96,6	93,1	93,1	93,1	93,1
		Sasaran 3. Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.	%	17,0	45,0	45,0	70,28	46,0	46,5	47,0	47,0

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam Menjabarkan lebih lanjut sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten demak menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2. 4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN	100%
				1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
				1.02.01.2.05.003	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>1 Dokumen</i>
				1.02.01.2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%
				1.02.01.2.06.001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah item Komponen listrik dan Penerangan bangunan kantor</i>	<i>11 Item</i>
				1.02.01.2.06.002	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah item peralatan Kantor</i>	<i>9 Item</i>
				1.02.01.2.06.003	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah peralatan Rumah Tangga tersedia</i>	<i>6 Item</i>
				1.02.01.2.06.004	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Tersedianya logistik Kantor</i>	<i>6 Item</i>
				1.02.01.2.06.005	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>6 Item</i>
				1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pencatatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
				1.02.01.02.07.002	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional/ lapangan	0 Item
				1.2.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6 Item
				1.02.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	2 Unit
				1.02.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor	2 Unit
				1.02.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit
				1.02.01.2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
				1.02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan materai	400 lembar
				1.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Bulan
				1.02.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	12 Kali
				1.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	3 orang
				1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
				1.02.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	20 Unit

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
				1.02.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	4 Item
				1.02.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang terpelihara	5 unit
				1.02.01.2.09.009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	6 Unit
				1.02.01.2.09.010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana yang dilakukan pemeliharaan	1 sarpras
				1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan masyarakat tiap faskes (RSUD dan Puskesmas)	89,20%
				1.02.01.2.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes Melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD dan Puskesmas)	29 fasyankes
				1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI DINAS KESEHATAN YANG DITINDAKLANJUTI	100%
				1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun	5 Dokumen
2.	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang Mencapai Target	100%				

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
				1.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja/renstra tersusun	1 Dokumen
				1.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen
				1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen
				01.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	1.490 Orang
				1.02.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	630 Orang
				1.02.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tersusun	1 Dokumen
				1.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersusun	1 Dokumen
3	Menurunnya Angka Kematian	a. Angka Kematian Bayi (AKB)	4,9 Per 1000 kelahiran hidup	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
		b. Angka Kematian Ibu (AKI)	98 Per 100.000 kelahiran hidup	1.02.02.2.001	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk (Per 100.000 penduduk)	2,4 Per 100.000 penduduk
				1.02.02.2.01.006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas dilakukan pengembangan	1 Puskesmas
				1.02.02.2.01.008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0 Paket
				1.02.02.2.01.009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya	1 Paket
				1.02.02.2.01.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas PUSTU	1 Paket
				1.02.02.2.01.012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pembangunan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	4 paket
				1.02.02.2.01.013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan	4 Paket
				1.02.02.2.01.014	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Paket
				1.02.02.2.01.016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	1 Paket
				1.02.02.2.01.017	Pengadaan Bahan Habis	Jumlah paket Pengadaan BMHP	1 Paket

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
				1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin	100%
				1.02.02.2.02.001	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	<i>Persentase Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar</i>	100%
				1.02.02.2.02.002	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	<i>Persentase Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standart</i>	100%
				1.02.02.2.02.003	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	<i>Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar</i>	100%
				1.02.02.2.02.004	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	<i>Persentase Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar</i>	100%
				1.02.02.2.02.005	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	<i>Persentase penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar</i>	100%
				1.02.02.2.02.006	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	<i>Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar</i>	100%
				1.02.02.2.02.007	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	<i>Persentase Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelaytanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	100%
				1.02.02.2.02.008	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	<i>Persentase Penderita Hipertensi yang dilayani sesuai standar</i>	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
				1.02.02.2.02.009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang dilayani sesuai standar	100%
				1.02.02.2.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ Berat yang dilayani sesuai standar	100%
				1.02.02.2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga tuberkulosis mendapat Pelayanan TBC sesuai standar	100%
				1.02.02.2.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				1.02.02.2.02.013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kasus KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	7 Kasus
				1.02.02.2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita stunting yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	4.901 Balita
				1.02.02.2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja bagi Pekerja Formal maupun Nonformal	96 Instansi/ kelompok kerja
				1.02.02.2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa yang melaksanakan 5 pilar STBM	27 Desa
				1.02.02.2.02.018 1.02.02.2.02.019	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melakukan pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	5 Kegiatan 27 Puskesmas

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
				1.02.02.2.02.020	Pengelolaan Surveilanse Kesehatan	Jumlah kegiatan program upaya promotif dan Preventif	5 Kegiatan
				1.02.02.2.02.022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penanganan gangguan jiwa dan Napza	2 Kegiatan
				1.02.02.2.02.023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan dalam pelaksanaan Upaya kesehatan Kusus	27 Puskesmas
				1.02.02.2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kegiatan pelayanan, penemuan dan penangan Penyakit menular	50 Kegiatan
				1.02.02.2.02.026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (pembiayaan Daerah)	65.334 Jiwa
				1.02.02.2.02.028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	3 Kegiatan
				1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Pelayanan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan	5 Kegiatan
				1.02.02.2.02.032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan Ketersediaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Bulan
				1.02.02.2.02.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah bulan dalam pelaksanaan kegiatan operasional di Puskesmas	12 Bulan
				1.02.02.2.02.034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sasaran vaksinasi covid-19	276.990 orang
				1.02.02.2.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	Jumlah Fasyankes terakreditasi	28

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
					Kabupaten /Kota		Fasyankes
				1.02.02.2.02.036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa	2 Kegiatan
				1.02.02.2.02.037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah AFP yang dilayani	7 Orang
				1.02.02.2.02.038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik	1 Aplikasi Sistem
				1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten	1 Dokumen
				1.02.02.2.03.001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Kegiatan penyediaan data dan informasi Kesehatan	1 Kegiatan
				1.02.02.2.03.002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Paket penunjang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SIK	1 Paket
				1.02.02.2.03.003	<i>Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet</i>	<i>Jumlah alat/ Perangkat Sistem informasi dan jaringan internet</i>	<i>1 Paket</i>
				1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin Operasional	4 Rumah Sakit

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
				1.02.02.2.04.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan capaian Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	15 Kegiatan
				1.02.02.2.04.004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya	93,10%	1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN BERKOMPETENSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	100%
				1.2.3.2. 01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase nakes mendapat rekomendasi ijin praktik	100%
				1.02.03.2.01.001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Nakes mendapat rekomendasi ijin praktek	100 Orang
				1.02.03.2.01.002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah SDMKG masuk dalam SISDMKG	100 Orang
				1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	1 Dokumen
				1.02.03.2.02.001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Renbut SDMKES yang tersusun	1 Dokumen

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
				1.02.03.2.02.002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan dalam upaya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	23 orang
				1.02.03.2.02.003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDMKes	2 Kegiatan
				1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis	100%
				1.02.03.2.03.001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Nakes yang mengikuti kegiatan Uji kompetensi (UKOM)	125 Orang
				1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SERTA SARANA PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN SESUAI KETENTUAN	100%
				1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%
				1.02.04.2.01.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindaklanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,	Jumlah sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berada dibawah	40 Sarana

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
					<i>Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>pengawasan</i>	
				01.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT	100%
				01.02.04.2.03.001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana P-IRT berizin produksi yang berada dibawah pengawasan	100 Sarana
5	Meningkatnya Gerakan Masyarakat hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	45,50%	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS (BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)	78%
				1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	329.000 Rumah Tangga

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja
				1.02.05.2.02.001	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga Mendapatkan pembinaan dan PHBS</i>	<i>329.000 Rumah Tangga</i>
				1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu mandiri	45,5%
				1.02.05.2.03.001	<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	<i>Jumlah Posyandu Strata mandiri</i>	<i>585 Posyandu</i>

2.4. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui **Perjanjian Kinerja**, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

- 1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atasperkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5
Indikator Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	%	100
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	4,9
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	98
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	96,6
		Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	70,28

Adapun definisi operasional dan formulasi indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2. 6
Definisi Operasional dan Formulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi penghitungan
1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah pemberian informasi terhadap jumlah Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan oleh masyarakat terkait Pelayanan kesehatan.	Jumlah pemberian informasi dibagi Jumlah Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan oleh masyarakat terkait Pelayanan kesehatan dikali 100
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan.	Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan yang mencapai target dibagi jumlah indikator sasaran yang ditetapkan dikali 100
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	Jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun pada satu tahun tertentu, dibagi Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali 1.000
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan dibagi Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali 100.000
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer	fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan adalah tempat memperoleh pelayanan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang minimal mempunyai status

No.	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi penghitungan
	dan rujukan terakreditasi minimal madya	kesehatan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya oleh lembaga akreditasi Nasional.	akreditasi Madya dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dikali 100
6	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.	Jumlah Desa siaga aktif mandiri dibagi jumlah desa dalam satu tahun tertentu dikali 100

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun Anggaran 2023, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Demak melaksanakan 5 program (1 program urusan penunjang dan 4 program urusan wajib) dengan 20 kegiatan dengan 92 sub kegiatan dengan didukung oleh 30 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 27 puskesmas, 1 Labkes dan 2 RSUD (RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah), masing masing UPTD di berikan Kuasa pengguna anggaran sehingga proses perencanaan dan realisasi anggaran dilaksanakan langsung oleh UPTD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupten Demak Pada Tahun 2023 yang tersedia sebesar Rp. 538.152.510.670,09,-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 513.793.540.225,00 atau sebesar 95,47%.

2.5. Rencana Anggaran Per Sasaran Kinerja Strategis

Adapun besaran anggaran Dinas Kesehatan yang direncanakan dari setiap Sasaran, program dan kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7
 Program/ Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung
 Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	525.019.211.151,09	538.152.510.670,09	13.133.299.519,00	2,50
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	525.019.211.151,09	538.152.510.670,09	13.133.299.519,00	2,50
1	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	392.925.750.173,09	405.459.049.692,09	12.533.299.519,00	3,19
1.1		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121.020.963.200,00	121.020.963.200,00	0,00	0,00
1.2.1.		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	111.688.191.000,00	111.688.191.000,00	0,00	0,00
1.2.2.		<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	9.045.082.200,00	9.045.082.200,00	0,00	0,00
1.2.3.		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	287.690.000,00	287.690.000,00	0,00	0,00
1.4.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.010.000,00	19.010.000,00	0,00	0,00
1.4.1.		<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	19.010.000,00	19.010.000,00	0,00	0,00
1.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284.800.000,00	284.800.000,00	0,00	0,00
1.5.1.		<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
		<i>Kepegawaian</i>				
1.5.2.		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	259.800.000,00	259.800.000,00	0,00	0,00
1.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.011.500,00	706.011.500,00	0,00	0,00
1.6.1.		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.6.2.		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	213.788.200,00	213.788.200,00	0,00	0,00
1.6.3.		<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	39.570.600,00	39.570.600,00	0,00	0,00
1.6.4.		<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	43.781.200,00	43.781.200,00	0,00	0,00
1.6.5.		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.6.6.		<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00
1.6.7.		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	354.571.500,00	354.571.500,00	0,00	0,00
1.6.8.		<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.7.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.562.802.300,00	2.722.802.300,00	160.000.000,00	6,24
1.7.1.		<i>Pengadaan Mebel</i>	38.317.800,00	170.303.500,00	131.985.700,00	344,45
1.7.2.		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	807.484.500,00	835.498.800,00	28.014.300,00	3,47
1.7.3.		<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1.642.000.000,00	1.642.000.000,00	0,00	0,00
1.7.4.		<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.7.5.		<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.8.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.776.200.000,00	2.776.200.000,00	0,00	0,00
1.8.1.		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.8.2.		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</i>	2.738.600.000,00	2.738.600.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
1.8.3.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00
1.9.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.900.000,00	613.900.000,00	-160.000.000,00	-20,67
1.9.1.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.9.2.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.060.000,00	156.060.000,00	0,00	0,00
1.9.3.		Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.9.4.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00
1.9.5.		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00
1.9.6.		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000,00	75.000.000,00	-160.000.000,00	-68,09
1.9.7.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
1.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	264.622.063.173,09	277.155.362.692,09	12.533.299.519,00	4,74
1.10.1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	264.622.063.173,09	277.155.362.692,09	12.533.299.519,00	4,74
2.	Sasaran 1. Menurunkan Angka Kematian	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	127.541.123.778,00	128.283.149.778,00	742.026.000,00	0,58
2.1.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.923.130.514,00	32.923.130.514,00	0,00	0,00
2.1.1.		Pengembangan Puskesmas	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
2.1.3.		Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.358.036.814,00	27.358.036.814,00	0,00	0,00
2.1.5.		Pengadaan Obat Vaksin	2.159.817.700,00	2.159.817.700,00	0,00	0,00
2.1.6.		Pengadaan Bahan Habis Pakai	613.276.000,00	613.276.000,00	0,00	0,00
2.2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.851.215.964,00	94.593.241.964,00	742.026.000,00	0,79
2.2.1.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.531.929.200,00	2.531.929.200,00	0,00	0,00
2.2.2.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.100.383.000,00	1.100.383.000,00	0,00	0,00
2.2.3.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.385.991.100,00	1.385.991.100,00	0,00	0,00
2.2.4.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.449.172.000,00	1.449.172.000,00	0,00	0,00
2.2.5.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.445.993.000,00	1.445.993.000,00	0,00	0,00
2.2.6.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.729.569.500,00	4.729.569.500,00	0,00	0,00
2.2.7.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	457.506.300,00	457.506.300,00	0,00	0,00
2.2.8.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.2.9.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00	0,00
2.2.10.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	260.280.000,00	260.280.000,00	0,00	0,00
2.2.11.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.722.531.000,00	1.722.531.000,00	0,00	0,00
2.2.12.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	720.938.100,00	720.938.100,00	0,00	0,00
2.2.13.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.161.653.000,00	960.308.000,00	-201.345.000,00	-17,33

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
2.2.14.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.934.999.230,00	8.534.999.230,00	600.000.000,00	7,56
2.2.15.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	479.820.000,00	479.820.000,00	0,00	0,00
2.2.16.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.384.421.400,00	1.384.421.400,00	0,00	0,00
2.2.17.		Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	2.043.359.300,00	2.043.359.300,00	0,00	0,00
2.2.18.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.2.19.		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.2.20.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	212.570.000,00	212.570.000,00	0,00	0,00
2.2.21.		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	153.165.000,00	153.165.000,00	0,00	0,00
2.2.22.		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.894.447.370,00	4.964.230.370,00	69.783.000,00	1,43
2.2.23.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	51.504.310.700,00	51.504.310.700,00	0,00	0,00
2.2.24.		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.2.25.		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	90.133.000,00	90.133.000,00	0,00	0,00
2.2.26.		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.834.081.000,00	1.834.081.000,00	0,00	0,00
2.2.27.		Operasional Pelayanan Puskesmas	3.432.864.000,00	3.706.452.000,00	273.588.000,00	7,97
2.2.28.		Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	232.230.000,00	232.230.000,00	0,00	0,00
2.2.29.		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (Satuan: Unit)	398.771.000,00	398.771.000,00	0,00	0,00
2.2.30.		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.2.31.		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	64.039.000,00	64.039.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
2.2.32.		<i>Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>	1.357.940.264,00	1.357.940.264,00	0,00	0,00
2.2.33.		<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga</i>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2.2.34.		<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</i>	48.810.000,00	48.810.000,00	0,00	0,00
2.2.35.		<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.2.36.		<i>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i>	92.108.500,00	92.108.500,00	0,00	0,00
2.2.37.		<i>Pengelolaan Kawasan tanpa rokok</i>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2.3.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	502.686.300,00	502.686.300,00	0,00	0,00
2.3.1.		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</i>	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.		<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	123.862.000,00	123.862.000,00	0,00	0,00
2.3.3.		<i>Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet</i>	153.824.300,00	153.824.300,00	0,00	0,00
2.4.		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	264.091.000,00	264.091.000,00	0,00	0,00
2.4.1.		<i>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</i>	128.091.000,00	128.091.000,00	0,00	0,00
2.4.2.		<i>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00
3.	Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.238.430.000,00	2.238.430.000,00	0,00	0,00
3.1.		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1.		<i>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
3.1.2.		<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.2.		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1.		<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2.		<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3.		<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
3.3.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.673.430.000,00	1.673.430.000,00	0,00	0,00
3.3.1.		<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.673.430.000,00	1.673.430.000,00	0,00	0,00
4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	468.140.000,00	468.140.000,00	0,00	0,00
4.1		Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.575.100,00	81.575.100,00	0,00	0,00
4.1.1.		<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	81.575.100,00	81.575.100,00	0,00	0,00

NO	Sasaran	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(6/4)*100
4.2.		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	386.564.900,00	386.564.900,00	0,00	0,00
4.2.1.		<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	386.564.900,00	386.564.900,00	0,00	0,00
5.	Sasaran 3. Meningkatnya Gerakan Masyarakat hidup Sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.845.767.200,00	1.703.741.200,00	-142.026.000,00	-7,69
5.1.		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	856.304.000,00	856.304.000,00	0,00	0,00
5.1.1.		<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	856.304.000,00	856.304.000,00	0,00	0,00
5.2.		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	989.463.200,00	847.437.200,00	-142.026.000,00	-14,35
5.2.1		<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	989.463.200,00	847.437.200,00	-142.026.000,00	-14,35

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Telah melaksanakan penilaian kinerja dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : *Permendagri 86 Tahun 2017*

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu:

1. Pada indikator Positif, Semakin tinggi realisasi dibandingkan target menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus perhitungan berikut :

$$\text{pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Pada Indikator negatif, Semakin rendah realisasi dibandingkan target maka menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{pencapaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3.2 ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023, 2022 terhadap Target Akhir Renstra Th.2026

Pada Tahun 2023, Dinas kesehatan Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021-2026, guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.

Tabel 3. 2
Target Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	%	100
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	4,9
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	98
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	96,6
		Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	70,28

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran tersebut, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana tersaji pada tabel 3.3 :

Tabel 3. 3
Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target	Realisasi	% Capaian 2023	% Capaian 2022	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Th.2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	90,54	102	102	101,60	Sangat Tinggi
1.1.	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,33	83,86	99,44	98,25	98,05	Sangat Tinggi
2.1.	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	88,89	88,89	100,00	88,89	Sangat Tinggi
3.	Angka Harapan Hidup	75,54	75,60	100,07	100,03	99,92	Sangat Tinggi
3.1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,9	3,41	130,41	124,00	127,45	Sangat Tinggi
3.2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	98	63,88	134,82	132,00	132,76	Sangat Tinggi
3.3.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	96,6	100,00	104	103,71	107,41	Sangat Tinggi
3.4.	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	70,28	83	118	135,65	176,60	Sangat Tinggi
Rata - rata capaian				109,83	110,63	115,98	
Selisih tahun 2023 dengan 2022 dan Target Akhir Renstra Th.2026					0,80	5,35	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023, dari 9 indikator kinerja Dinas Kesehatan yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 terlihat bahwa 8 dari 9 indikator kinerja telah memenuhi target kinerja tahun 2023. 1 indikator yang tidak memenuhi target kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi nilai SAKIP 83,86 dari target 84,33 (% capaian : 99,44%). Pencapaian kinerja masing masing indikator tergambar pada uraian berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Tidak optimalnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan publik yang responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat. Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. 4
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes Kab. Demak Tahun 2022 dan 2023

NO.	Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	90,73	102	89	90,54	102	90	101,6

Sumber : Dinas Kesehatan 2023

Pada tahun 2023 dari data realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat menunjukkan angka 90,54. Angka ini lebih besar dari nilai target sebesar 89 dengan persentase capaian kinerja sebesar 102%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 102% telah mencapai lebih dari target kinerja akhir Renstra dengan persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 101,60%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2023 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja capaian indeks kepuasan masyarakat masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik yang telah dilakukan adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian Kinerja pada Indikator tersebut apabila dibandingkan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dengan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi lebih tinggi capaian Dinas Kesehatan Provinsi yaitu 106%, akan tetapi dapat dilihat pada tabel berikut bahwa target dan realisasi Dinas Kesehatan kabupaten demak lebih tinggi dibandingkan Target dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi.

Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian Kinerja Dinkes Kab. Demak dengan Dinkes Provinsi

No	Indikator	Dinas Kesehatan Tahun 2023			Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	90,73	102	85,5	89,75	106

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Demak dan Dinkes Prov. Jateng Tahun 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah perbedaan persepsi tentang isi kuesioner oleh masyarakat, sehingga menyebabkan adanya subyektifitas dari masyarakat, kurangnya pemahaman responden tentang SOP pelayanan yang dirasa tidak sesuai dengan harapan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam memberikan penilaian, dan kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan tanpa bertanya kepada petugas yang bertanggungjawab terhadap penyebaran kuesioner. Selain itu, Minimnya SDM menyebabkan kurangnya pemberian penjelasan tentang kuesioner kepada responden yang mengalami kesulitan dalam mengisi kuesionernya.

Adapun Upaya yang telah diambil dalam penanganan permasalahan tersebut adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang SOP pelayanan yang akan diterima, meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (*public service*) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan, dan telah dilaksanakan peningkatan SDM aparatur tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indikator sasaran kinerja dari Nilai indeks kepuasan masyarakat adalah Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti.

- a. Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti.

Masih adanya aduan masyarakat, baik aduan *offline* maupun *online* sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Tabel 3. 6
Capaian Kinerja Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Dinkes Kab. Demak Tahun 2022 dan 2023

NO.	Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinkes Kab. Demak 2023

Pada tahun 2023 dari data realisasi nilai Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti menunjukkan angka 100%, sama dengan nilai target tahun 2022 sebesar 100%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% sama dengan persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% dan persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2023 telah mencapai Target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja capaian Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Responsivitas menjadi penting bagi peningkatan pelayanan publik. Masih adanya aduan dari masyarakat menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan publik yang responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat.

Permasalahan dalam pencapaian target kinerja di indikator ini adalah masyarakat masih banyak yang belum mengetahui sarana pengaduan yang tersedia baik secara *online*

maupun *offline*. Selain itu, masyarakat juga kesulitan dalam memahami tata cara pengaduan secara langsung maupun elektronik.

Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang kanal aduan masyarakat baik secara *online* maupun *offline*. Agar pengelolaan pengaduan berjalan dengan baik, maka telah ditempatkan petugas yang kompeten yaitu petugas dengan pemahaman tentang ketentuan dan dapat melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Terdapat 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai dalam upaya mereformasi birokrasi yaitu, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Akar masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dalam upaya perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja.

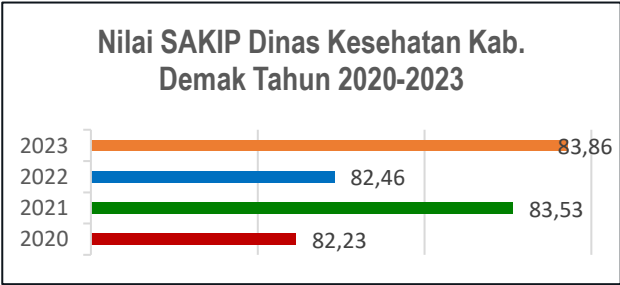
Tabel 3. 7
Capaian Kinerja Nilai SAKIP Dinkes Kab. Demak Tahun 2022 dan 2023

NO.	Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,93	82,46	98,25	84,33	83,86	99,44	85,53	98,05

Sumber : Dinkes Kab. Demak Tahun 2023

Pada tahun 2023 dari data realisasi nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan angka 83,86. Nilai SAKIP 2023 masih belum mencapai target kinerja 2023 yang memiliki target sebesar 84,33. Meskipun begitu, nilai SAKIP tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tahun 2022 sebesar 82,46. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99,44% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98,25% dan masih belum mencapai target akhir Renstra tahun 2026 dengan persentase capaian terhadap target akhir renstra 2026 sebesar 98,05%. Meskipun demikian, Nilai SAKIP Dinas Kesehatan masuk kedalam Kategori A. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2023 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Demak cenderung fluktuatif yang mana mengalami penurunan dan kenaikan, Hasil Nilai SAKIP dapat dilihat pada grafik Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Demak pada tahun 2020-2023 berikut ini :

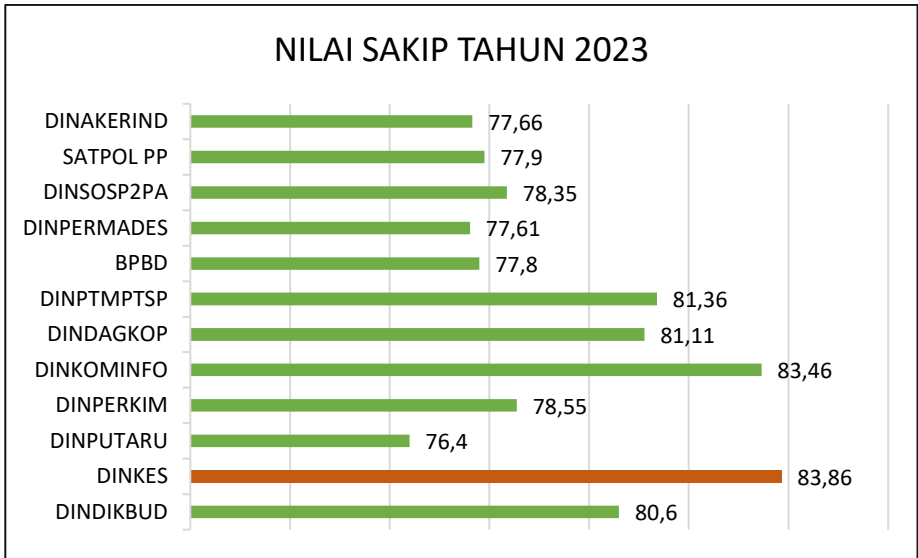
Grafik 3. 1
Nilai SAKIP DINKES Tahun 2020-2023



Sumber :
Dinkes Kab. Demak 2023

Apabila dibandingkan dengan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan kabupaten Demak dengan Nilai SAKIP pada beberapa OPD di kabupaten Demak, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mendapatkan Nilai SAKIP tertinggi pada tahun 2023, dan mendapatkan penghargaan sebagai OPD yang mendapatkan nilai tertinggi pada tahun 2023 untuk kategori non Inspektorat. Perbandingan Nilai tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3. 2
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023



Sumber : Dinkes Kab. Demak 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih kurang optimalnya kualitas feedback dari proses evaluasi perencanaan, masih kurangnya kualitas perencanaan yang dirancang dalam hal penyajian dokumen analis penentuan target kinerja berdasarkan target SPM Nasional. Pada komponen pengukuran kinerja penyajian surat rekomendasi penempatan/penghapusan jabatan menjadi dasar penghapusan atau penempatan jabatan baik struktural ataupun fungsional. Pada pelaporan kinerja, dinas kesehatan belum melakukan reviu berjenjang pada penyusunan laporan kinerja. Meskipun demikian, Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2023 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, dan mendapatkan **predikat "A"** atau Sangat baik.

Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah menyajikan dokumen analis penentuan target kinerja berdasarkan target SPM Nasional dan melakukan rivi u berjenjang pada penyusunan dokumen laporan kinerja.

Indikator Sasaran kinerja dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target.

a. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target

Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dihitung berdasarkan Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan.

Tabel 3. 8
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang mencapai Target Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO.	Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100,00	100	88,89	88,89	100	88,89

Sumber : Dinkes Kab. Demak Tahun 2023

Pada tahun 2023 dari data pada tabel realisasi Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daperah yang mencapai target menunjukkan angka 99,44%, Nilai ini turun dari nilai target tahun 2022 yang mendapatkan nilai sebesar 100%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99,44%. Penurunan Capaian Kinerja ini terjadi karena dari sembilan Indikator terdapat satu indikator yang belum tercapai yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Meskipun demikian capaian indikator sasaran tahun 2023 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja 76% ≤ 90%, yang artinya kinerja capaian Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target masuk ke dalam **kategori capaian tinggi**.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target adalah masih kurangnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, masih kurangnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan, dan masih kurangnya peningkatan kualitas sumber daya ASN Dinas Kesehatan.

Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah telah dilakukan Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan, dan Peningkatan kualitas sumber daya ASN Dinas Kesehatan dengan adanya pelatihan dan Pendidikan dalam peningkatan kompetensi.

3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan untuk hidup atau dapat diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu oleh suatu generasi (seseorang sejak lahir) berdasarkan rata-rata statistik (berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada <https://jateng.bps.go.id/>.

Tabel 3. 9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator AHH Tahun 2022 dan Tahun 2023

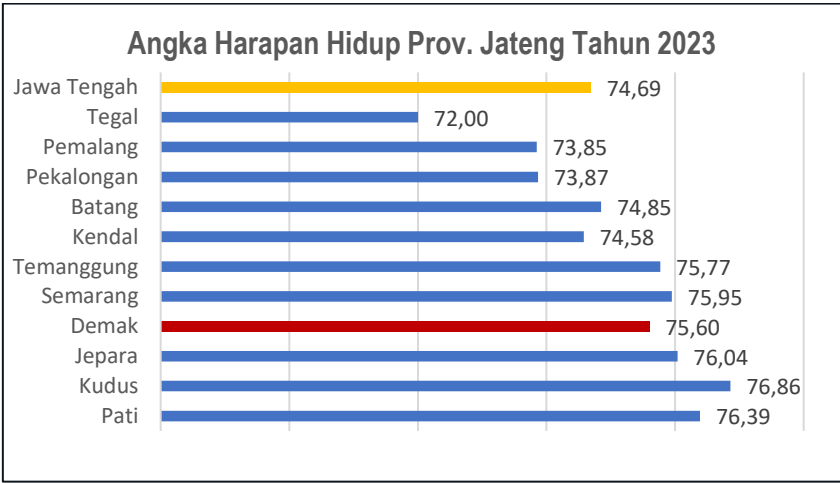
NO.	Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Harapan Hidup	75,50	75,52	100,00	75,54	75,60	100,08	75,66	99,92

Sumber : BPS Tahun 2023

Target AHH pada tahun 2023 sebesar 75,54 dengan realisasi AHH sebesar 75,60, hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja atas target AHH tahun 2023 sebesar 100,07% dan persentase capaian kinerja atas target akhir Renstra sebesar 99,92%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2023 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja capaian angka harapan hidup masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. AHH di Kabupaten Demak selama tahun 2021-2023 menunjukkan adanya peningkatan yang berkelanjutan. Tahun 2022 AHH sebesar 75,52, dan pada tahun 2023 AHH meningkat menjadi 75,60. Peningkatan umur harapan hidup menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan pada tahun 2023 mempunyai harapan hidup mencapai umur 75,60 tahun lebih panjang 0,08 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir ditahun 2022.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Demak tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah, capaian kabupaten Demak lebih tinggi. Begitupula bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan perbandingan antara capaian AHH kabupaten Demak dengan AHH di kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 3. 3
Angka Harpan Hidup (AHH) Prov. Jateng Tahun 2023



Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah:

- a. Tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh karena Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular. Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, kematian balita.

- b. Masih adanya kasus kekurangan gizi yang disebabkan oleh karena Masih adanya kasus Balita Gizi buruk dan Masih adanya kasus stunting. Hasil capaian stunting pada tahun 2023 dinas kesehatan berdasarkan pada hasil yang tercatat di SSGI adalah 9,5%.
- c. Masih terjadi keterlambatan tenaga kesehatan dalam mengenali faktor resiko tinggi pada ibu hamil dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran ibu dan keluarga dalam mengenali faktor resiko tinggi dan penyakit yang menyertanya.
- d. Masih kurang optimalnya budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang disebabkan oleh karena Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.
- e. Masih adanya desa yang belum paham mengenai Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sehingga pihak desa masih belum melaksanakan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) secara mandiri, masih bergantung pada Puskesmas.

Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah :

- a. Menurunkan penyakit menular dan tidak menular melalui Peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan Penguatan surveilans penyakit dan Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi;
- b. Peningkatan status gizi. Melalui Peningkatan pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk; Peningkatan cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat; dan Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD.
- c. Memaksimalkan pendampingan kader ibu hamil risiko tinggi dan memaksimalkan kelas ibu hamil yang diikuti oleh ibu hamil dan suami atau keluarga di seluruh desa, optimalisasi pemanfaatan aplikasi Cengkraman Mata elang (CME), memaksimalkan pelaksanaan rujukan terencana secara berkala, Memberikan pelayanan ANC berkualitas secara terintegrasi dengan lintas program.
- d. Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS, Melalui Sosialisasi dan advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; Pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media; dan peningkatan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.
- e. Melaksanakan Koordinasi, advokasi dan persamaan persepsi terkait Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan pihak desa, puskesmas dan lintas sektor terkait.

Indikator sasaran kinerja dari Angka Harapan Hidup adalah :

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan variabel yang sangat perlu menjadi perhatian, karena variabel tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan usia harapan hidup di suatu wilayah. Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Indikator AKB adalah indikator negatif yang apabila kurang dari target yang ditetapkan maka menunjukkan kinerja baik.

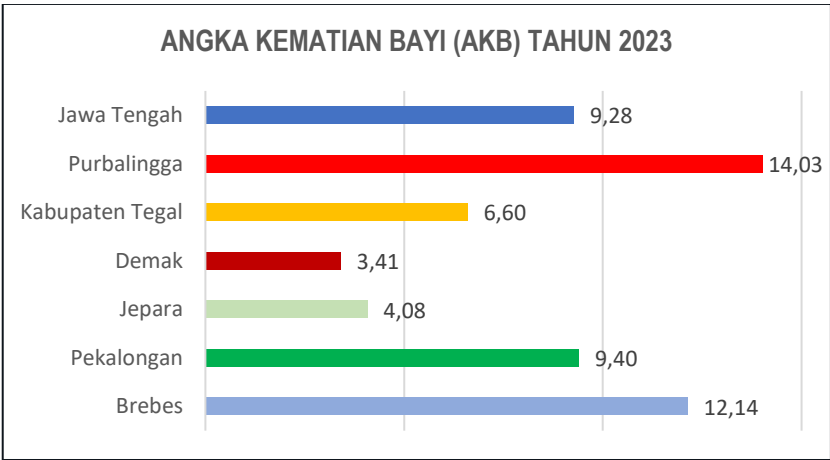
Tabel 3. 10
Angka Kematian Bayi (AKB) Dinkes Kab. Demak Tahun 2023

NO .	Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,90	3,73	124,00	4,9	3,41	130,41	4,7	127,45

Pada tahun 2023 dari data realisasi kinerja AKB menunjukkan angka 3,41 dari target tahun 2023 sebesar 4,9. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 130,41%, lebih tinggi persentase capaian kinerjanya dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 124% dan telah memenuhi target persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 127,45%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2023 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya status kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) masuk ke dalam kategori capaian sangat tinggi.

Apabila Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Demak dibandingkan dengan capaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah, Capaian Kabupaten Demak sudah sangat baik. Karena AKB merupakan Indikator Negatif sehingga apabila capaian semakin kecil dari target maka capaian tersebut semakin baik. Perbandingan Capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 4
Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2023



Sumber : LkjiP Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten dan Prov Jateng

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah diantaranya adalah Masih adanya keterlambatan tenaga Kesehatan dalam mengenali faktor risti ibu hamil, tingkat pelayanan antenatal, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Penyebab kematian bayi adalah Pneumonia, Diare, Kelainan Saluran Cerna, Tetanus, Kelainan Saraf, Asfiksia, BBLR, dan Lain-lain (Kejang, Cardiac arrest, DB, Kelainan Kongenital). Penyebab terbanyak kematian bayi adalah Faktor BBLR dan Akfisia, dipengaruhi juga oleh faktor Riwayat kehamilan dari ibu.

Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah peningkatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, Pelatihan ini juga dilakukan untuk penatalaksanaan Asfiksia dan BBLR di fasilitas kesehatan pratama. Dalam mencegah Anemia, dilaksanakan Gerakan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri sebagai Upaya pencegahan anemia yang mana menjadi salah satu faktor kematian bayi.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dihitung berdasarkan Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan.

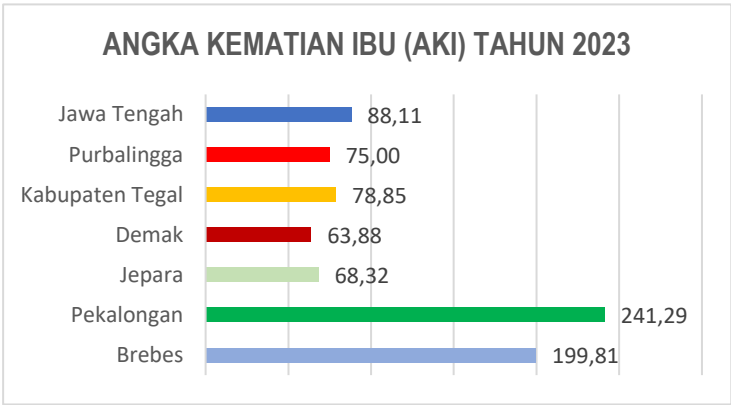
Tabel 3. 11
Angka Kematian Ibu (AKI) Dinkes Kab. Demak Tahun 2023

NO.	Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	99,00	67,3	132,00	98	63,88	134,82	95	132,76

Pada tahun 2023 dari data realisasi menunjukkan angka 63,88 dengan nilai target AKI tahun 2023 sebesar 98. Indikator AKI dan AKB merupakan indikator negatif yang mana semakin rendah angka realisasi dari target maka semakin baik capaiannya. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 134,82%, angka ini lebih tinggi dari persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 132% dan telah mencapai target persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 132,76%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2023 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja capaian Angka Kematian Ibu (AKI) masuk ke dalam kategori capaian sangat tinggi.

Apabila dibandingkan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain di Jawa Tengah, Capaian Kabupaten demak pada Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) sudah cukup baik. Indikator ini merupakan Indikator negaif sehingga semakin jauh capaiannya dari target yang ditentukan maka semakin baik capaiannya. Berikut ini disajikan grafik perbandingan capaian kabypaten Demak dengan Kabupaten lain di beberapa kabupaten di Jawa Tengah.

Grafik 3. 5
Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2023



Sumber : Dinkes Kab.Demak dan Dinkes Prov. Jateng tahun 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Persentase indikator kinerja Angka Kematian Ibu adalah adanya kasus gangguan Hipertensi (3 kasus dari 12 kasus AKI), perdarahan (4 kasus dari 12 kasus AKI), gangguan kelainan jantung dan pembuluh darah (1 kasus dari 12 kasus AKI), Gangguan Autoimun (1 kasus dari 12 kasus AKI), dan lain-lain (2 kasus dari 12 kasus AKI). Masih adanya faktor keterlambatan tenaga Kesehatan dalam mengenali faktor resiko tinggi. Kesadaran dan kurangnya pengetahuan dari ibu hamil dan keluarganya dalam mengenali faktor risiko tinggi dan penyakit penyerta yang dialami juga menjadi salah satu faktor AKI.

Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah pendampingan kader bumil resti, pelaksanaan kelas ibu hamil yang diikuti juga oleh suami atau keluarga, optimalisasi pemanfaatan aplikasi Cengkraman Mata elang (CME), memaksimalkan pelaksanaan rujukan terencana secara berkala, Pemberian Pelayanan ANC yang berkualitas secara terintegrasi dengan listas program.

- 3) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya
- Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan adalah tempat memperoleh pelayanan kesehatan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya oleh lembaga akreditasi Nasional. Dalam rangka transformasi sistem kesehatan, Dinas Kesehatan kabupaten Demak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan, salah satunya dilakukan dengan penilaian terhadap tingkat mutu yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi.

Tabel 3. 12
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
Terakreditasi Minimal Madya Tahun 2022 dan 2023

NO.	Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	93,10	96,6	132,00	96,6	100,00	104	93,1	107,41

Pada tahun 2023 terjadi perubahan target pada indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya, dari 93,1% menjadi 96,6%. Meskipun mengalami kenaikan target pada tahun 2023 hasil capaian indikator ini mencapai 100% atau dengan tingkat capaian sebesar 104%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 103,71% dan telah melebihi persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 107,41%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2023 telah mencapai target Nilai

Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Pembinaan dan penyiapan akreditasi maupun reakreditasi sarana pelayan kesehatan dasar dan rujukan merupakan upaya penjaminan mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah Pada tahun ini yang dapat terakreditasi baru klinik yang bekerjasama dengan BPJS, sedangkan klinik yang tidak bekerjasama dengan BPJS masih dalam proses akreditasi sehingga untuk fasilitas pelayanan Kesehatan primer (klinik) di tahun 2023 belum semuanya terakreditasi, meski demikian untuk fasilitas pelayanan Kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit telah terakreditasi seluruhnya.

Adapun solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) untuk mendorong klinik yang tidak bekerja sama dengan BPJS agar segera mendaftar akreditasi di DFO, Optimalisasi monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan dalam penataan tata graha klinik.

4) Persentase Desa Siaga aktif mandiri

Pembinaan dan penyiapan akreditasi maupun reakreditasi sarana pelayan kesehatan dasar dan rujukan merupakan upaya penjaminan mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan.

Tabel 3. 13
Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri Tahun 2022 dan 2023

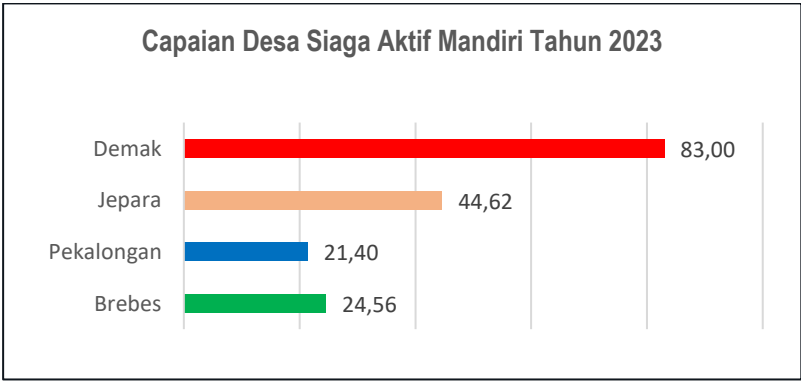
NO.	Indikator Kinerja	2022			2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	45,00	61,04	135,64	70,28	83,00	118	47	176,60

Sumber : Dinkes kab. Demak Tahun 2023

Pada tahun 2023, Indikator Desa siaga aktif mandiri juga mengalami perubahan dari 45,5% menjadi 70,28%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 118%. Capaian ini memang lebih rendah dari tahun 2022 karena adanya perubahan jumlah target. Meskipun demikian, pada tahun 2023 indikator ini telah melebihi dari target baru yang ditetapkan dengan hasil realisasi sebesar 83% dari target sebesar 70,28%. Indikator ini telah mencapai target persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 176,6%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2023 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $91\% \leq 100\%$, yang artinya kinerja Persentase Desa Siaga aktif mandiri masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**.

Capaian Desa Siaga Aktif Mandiri kabupaten Demak apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang memiliki indikator yang sama, capaian kabupaten Demak sudah sangat baik. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel grafik berikut.

Grafik 3. 6
Capaian Desa Siaga Aktif Mandiri Tahun 2023



Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah Masih adanya desa yang belum melaksanakan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) secara mandiri, desa masih bergantung pada Puskesmas. Hal ini terjadi karena desa masih belum paham bahwa Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) seharusnya dilaksanakan mandiri oleh pihak desa. Pengangggaran dana desa yang belum maksimal untuk kegiatan desa siaga mandiri.

Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah dengan adanya koordinasi, advokasi, dan persamaan persepsi terkait pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan Pihak desa, Puskesmas, dan lintas sektor terkait termasuk dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk mencapai Kelurahan Siaga Mandiri.

3.2.2 Analisis Penyebab Kegagalan / Keberhasilan dan Solusi Yang Telah Dilakukan

- a. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:
 - 1) Belum optimalnya pelayanan KIA, Masih adanya kasus kekurangan gizi (stunting, gizi kurang, balita kurus, ibu hamil KEK), kurangnya tenaga dan kualitas bidan dan tenaga medis PONED, serta masih kurangnya sarana dan prasana dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Belum Optimalnya Penyakit Menular dan penegendalian penyakit tidak menular.
 - 3) Masih adanya desa yang belum paham mengenai Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sehingga pihak desa masih belum melaksanakan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) secara mandiri, masih bergantung pada Puskesmas.

- 4) Belum semua klinik siap untuk melaksanakan akreditasi karena masih kurang dalam penataan tata grahanya.
- 5) Kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga penunjang urusan kesehatan; Masih kurangnya Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk;
- 6) Masih kurang optimalnya budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang disebabkan oleh karena Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.

b. Upaya yang Telah Dilakukan

- 1) Meningkatkan pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk; Peningkatan cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat; dan Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan dengan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir, dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga bidan desa dan tenaga PONEC, peningkatan pengetahuan keluarga dengan Ibu Maternal, Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak sertapemberian makanan tambahan.
- 2) Pembentukan dan pembinaan Posbindu, peningkatan UKBM, peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemeriksaan kualitas air minum, rumah sehat, akses air bersih, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) dan pemucuan jamban, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan dengan *stakeholder* terkait. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
- 3) Melaksanakan Koordinasi, advokasi dan persamaan persepsi terkait Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan pihak desa, puskesmas dan lintas sektor terkait.
- 4) Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan dalam penataan tata graha klinik;
- 5) Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada dengan merangkap tugas dan fungsi; Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan dengan stakeholder terkait dalam upaya pemetaan dan pengusulan pemenuhan tenaga kesehatan.

- 6) Mengoptimalkan Kegiatan Promotif Preventif melalui GERMAS, Sosialisasi dan advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; dan peningkatan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.

c. Strategi

Adapun Strategi untuk pencapaian dan peningkatan kinerja, antara lain Peningkatan Pelayanan Kesehatan promotif, Preventif dengan tetap memperhatikan kuratif dan rehabilitatif.

- 1) Peningkatan status gizi dengan pemberian Makanan tambahan pada balita dengan berat badan dibawah garis merah dan penderita gizi buruk; Peningkatan deteksi tumbuh kembang sejak dini pada anak PAUD untuk mencegah adanya permasalahan gizi; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui Peningkatan kualitas pelayanan ANC dengan minimal pelayanan 6 kali selama kehamilan; Pemanfaatan Pemeriksaan USG minimal 2 kali selama kehamilan pada trimester 1 dan trimester 3; Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas Poned, RS Ponek; dan peningkatan pola asuh balita dan peningkatan pengetahuan petugas;
- 2) Peningkatan mutu pelayanan untuk menurunkan penyakit menular dan tidak menular; kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan Penguatan survailans penyakit dan Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi;
- 3) Peningkatan Koordinasi dan Advokasi Secara masif; Peningkatan Kapasitas tim Internal dan tim eksternal, serta melakukan monitoring dan evaluasi;
- 4) Peningkatan Koordinasi bersama dengan ASKLIN dalam monitoring dan evaluasi penataan tata graha klinik;
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, tugas belajar, kursus, bimbingan teknik program, dan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan;
- 6) Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS. Melalui Sosialisasi dan advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; Pembuatan dan penyebaran informasi melalui berbagai media; dan peningkatan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.

d. Kebijakan

Kebijakan Dinas Kesehatan yang diambil dalam upaya menyelesaikan Permasalahan berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 14
Kebijakan Strategis yang Diterapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Demak Tahun 2023

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Penurunan AKI, AKB diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas PONEK, RS PONEK, serta penyediaan RTK	a. Peraturan Bupati No. 41 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak b. Peraturan Bupati No. 74 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak c. Peraturan Bupati No. 87 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi Pelaksanaan SPM di Puskesmas maupun RS sebagai fasyankes rujukan.
2.	Pelayanan kesehatan balita di prioritaskan pada pelayanan deteksi dini tumbuh kembang balita, PAUD, KB	a. Peraturan Bupati No. 74 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak
3.	Peningkatan ASI Eksklusif diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan dan penyediaan sarpras pojok laktasi, Peningkatan status gizi balita diprioritaskan pada deteksi dini tumbang dan perwujudan keluarga sadar gizi (kadarsi)	a. Peraturan Bupati No. 29 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kabupaten Demak Tahun 2019-2021	Memberikan kepastian dan landasan hukum dalam upaya pencegahan masalah gizi

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
4.	Penurunan kasus penyakit menular diprioritaskan pada upaya promotif dan preventif, Peningkatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan diprioritaskan pada BANKESDA Rujukan dan peserta BPJS Non PBI.	a. SK Kadinkes No. 440/0009/2023 tentang Petunjuk teknis pelayanan program jamkesda th. 2023 b. SK Kadinkes tentang perjanjian kerjasama pelayanan Bankesda antara: 1) No. 440/087/2023: Dinkes Kab Demak dengan RSUD Sunan Kalijaga Demak 2) No. 440/086/2023: Dinkes Kab Demak dengan RSUD Sultan Fatah Demak 3) No. 440/104/2023: Dinkes Kab Demak dengan RSUP Dr. Kariadi Semarang 4) No. 440/105/2023: Dinkes Kab Demak dengan RSUD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	Memberikan kepastian dan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pomotif dan preventif, serta pelayanan Bankesda
5.	Pelayanan kesehatan dasar diprioritaskan pada perwujudan akreditasi puskesmas dengan Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar serta penyediaan obat dan perbekes diprioritaskan pada penggunaan obat yang rasional	SK Bupati Demak No. 440/357 tahun 2021 tentang Penertapan tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Demak	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

e. Prioritas Daerah

Capaian indikator Prioritas Daerah dalam pembangunan bidang kesehatan Tahun 2023 adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya, dan persentase desa siaga aktif. Pada tahun 2023 Target angka kematian bayi (AKB) adalah 4,9 dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3,41 dan capaian sebesar 130,41%. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 memiliki target 98 dengan realisasi sebesar 63,88 dan capaian 134,82%. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator negative, sehingga Semakin rendah realisasi dibandingkan target maka menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya

pada 2023 ditargetkan sejumlah 96,6% dengan realisasi 100% dan capaian sebesar 104%. Target Persentase desa siaga aktif mandiri pada tahun 2023 sebesar 70,28% dan realisasi mencapai 83% serta capaian sejumlah 118%.

3.2.3 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan pada realisasi Anggaran dan Realisasi capaian kinerja program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran indikator kinerja utama (IKU) diluar program rutin maka efektifitas dan efisiensi anggaran dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Efektivitas

=

% Capaian Kinerja Program

% Capaian Kinerja Anggaran

x 100%

Capaian dapat dikategorikan dalam kategori **efektif** apabila **capaian kinerja sama dengan atau lebih dari 100%**. Berdasarkan rumusan tersebut, maka implementasi

Efektivitas

=

100,85

95,60

x 100%

= 115,95 % (Kriteria : Efektif)

penghitungan analisis efektivitas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah :

Analisis efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan output yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Efisiensi

=

% Capaian Kinerja Program-% Capaian Realisasi Anggaran

Capaian dapat dikategorikan dalam kategori **efisiensi** apabila **nilai kurang dari atau sama dengan 100%**. Berdasarkan rumus tersebut,maka implementasi perhitungan analisis efisiensi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah :

Efisiensi

=

110,85% – 95,60% = 15,25% (Kriteria : Efisien)

Tingkat capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Kesehatan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja kepala dinas kesehatan Kabupaten Demak tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. 15
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	(%)
1	Terwujud-nya Pelayanan Publik yang responsif	1.1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	284.278.086.492,00	268.569.112.501,00	94,47
									Total Per Sasaran	284.278.086.492,00	268.569.112.501,00	94,47
2	Meningkat-nya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	2.1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	%	100	100	100	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	121.180.963.200,00	117.654.792.401,00	97,09
									Total Per Sasaran	121.180.963.200,00	117.654.792.401,00	97,09
3	Menurun-nya Angka Kematian	3.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	4,9	3,41	130,41	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.283.149.778,00	123.213.794.602,00	96,05
		3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	98	63,88	134,82					
									Total Per Sasaran	128.283.149.778,00	123.213.794.602,00	96,05
4	Meningka-tnya kualitas pelayanan kesehatan	4.1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	96,6	100	104	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.238.430.000,00	2.181.254.978,00	97,45
								5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	468.140.000,00	453.532.000,00	96,88
									Total Per Sasaran	2.706.570.000,00	2.634.786.978,00	97,35
5	Meningka-tnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	5.1	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	70,28	83	118	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.703.741.200,00	1.585.216.790,00	93,04
									Total Per Sasaran	1.703.741.200,00	1.585.216.790,00	93,04

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
TINGKAT EFEKTIVITAS :115,95%										
TINGKAT EFISIENSI :15,25%										
							Total Keseluruhan	538.152.510.670,00	513.793.540.225,00	95,47

Kesimpulan : Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penghitungan efisiensi dan efektifitas terhadap capaian program dan anggaran maka dihasilkan tingkat efektifitas sebesar 115,95% dan tingkat efisiensi sebesar 15,25%. Jadi pelaksanaan anggaran dan program dan kegiatan Dinas kesehatan **Sudah efektif dan sangat efisien.**

Tabel 3. 16
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI DINAS KESEHATAN YANG DITINDAKLANJUTI	100	100	100	100	100	100	100
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun	7	-	7	7	7	100	7
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	-	7	1	1	100	1
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	-	1	1	100	1
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	-	1	1	100	1
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	-	-	4	4	100	4

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1	12	1	1	1	100	1
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.340	-	2.163	1.340	1.340	100	1.340
1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	-	1	2	2	100	2
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	1	1	1	100	1
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN	100	100	100	100	100	1	100
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1	-	-	1	1	100	1
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	-	1	1	100	1
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
1.4.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	-	1	1	1	100	1
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	-	-	6	6	100	6

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	11	-	11	11	11	100	11
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	8	-	6	8	8	100	8
1.5.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	-	6	6	6	100	6
1.5.4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	-	6	6	6	100	6
1.5.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6	-	3	6	6	100	6
1.5.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	-	-	10	10	100	10
1.5.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	50	-	50	50	50	100	50
1.5.8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30	-	30	30	30	100	30
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	7	6	7	7	7	100	7
1.6.1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	-	0	3	3	100	3
1.6.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	-	4	4	4	100	4

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.3.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	-	1	1	100	1
1.6.4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	11	-	-	11	11	100	11
1.6.5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	-	-	10	10	100	10
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	12	100	100	100	100	100
1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	-	1	1	1	100	1
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	-	12	12	12	100	12
1.7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	-	2	2	2	100	2
1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara	36	12	36	36	36	100	36

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	-	-	15	15	100	15
1.8.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	-	18	19	19	100	19
1.8.3.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	3	-	3	3	3	100	3
1.8.4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	-	-	10	10	100	10
1.8.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	-	3	3	3	100	3
1.8.6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	6	1	1	100	1
1.8.7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	-	-	1	1	100	1

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.9.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	29	-	29	29	29	100	29
1.9.1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29	-	29	29	29	100	29
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata persentase capaian SPM bidang kesehatan	100	100	100%	100	100	100	100
2.1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk	2,4	30	2,4	2,4	2,4	100	2,4
2.1.1.	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	-	-	1	1	100	1
2.1.2.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1	-	3	1	1	100	1
2.1.3.	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan	3	-	3	3	2	67	3
2.1.4.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	22	-	1	22	22	100	22

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.5.	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	1	-	1	1	1	100	1
2.1.6.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	1	-	1	1	1	100	1
2.2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin	100	5	100	100	100	100	100
2.2.1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.729	-	21254	18.729	18.729	100	18.729
2.2.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.729	-	20226	18.729	18.729	100	18.729
2.2.3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.784	-	20300	18.784	18.784	100	18.745
2.2.4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79.866	78.966	78600	79.866	79.866	100	79.866
2.2.5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179.382	-	178645	179.382	179.382	100	179.382
2.2.6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	778.298	776.540	778298	778.298	778.298	100	778.298
2.2.7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	128.062	-	126000	128.062	128.062	100	128.062
2.2.8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	309.281	309.336	313601	309.281	309.281	100	309.281

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.118	18.762	18762	19.118	19.118	100	19.118
2.2.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.502	2.642	2811	2.502	2.502	100	2.502
2.2.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.858	-	8682	15.858	15.858	100	15.858
2.2.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar	20.368	-	19.836	20.368	20.368	100	20.368
2.2.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	-	1	1	1	100	1
2.2.14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	-	1	1	1	100	1
2.2.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	-	2	2	2	100	2
2.2.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	-	5	5	5	100	5
2.2.17.	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	-	2	2	2	100	2

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.18.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melakukan pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	27	-	1	27	27	100	27
2.2.19.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	-	1	1	1	100	1
2.2.20.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penanganan gangguan jiwa dan Napza	27	-	27	27	18	67	27
2.2.21.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	-	1	1	1	100	1
2.2.22.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	-	1	1	1	100	1
2.2.23.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	-	1	1	1	100	1
2.2.24.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	60	-	-	60	60	100	60
2.2.25.	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	29	-	29	29	29	100	29
2.2.26.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5	-	5	5	5	100	5

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.27.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	-	1	1	1	100	1
2.2.28.	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	-	1	1	1	100	1
2.2.29.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	29	-	28	29	29	100	29
2.2.30.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	-	-	1	1	100	1
2.2.31.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	-	1	1	1	100	1
2.2.32.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	-	1	1	1	100	1
2.2.33.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	294.974	-	-	294.974	294.974	100	294.974
2.2.34.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.500	-	-	1.500	1.500	100	1.500
2.2.35.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140	-	-	140	140	100	140

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.36.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40	-	-	40	34	85	40
2.2.37.	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1	-	-	1	1	100	1
2.3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik	1	12	1	1	1	100	1
2.3.1.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	-	1	1	1	100	1
2.3.2.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	-	1	1	1	100	1
2.3.3.	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1	-	1	1	1	100	1
2.4.	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin Operasional	5	-	5	5	5	100	5
2.4.1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5	-	5	5	5	100	5
2.4.2.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5	-	5	5	5	100	5

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN BERKOMPETENSI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	100	100	100	100	100	100	100
3.1.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Nakes Mendapat Rekomendasi Ijin Praktik	100	-	100	100	100	100	100
3.1.1.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	-	1	1	1	100	1
3.1.2.	Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2	-	2	2	2	100	2
3.2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	1	-	1	1	1	100	1
3.2.1.	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	-	1	1	1	100	1
3.2.2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	850	-	750	850	850	100	850

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2.3.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	-	0	1	1	100	1
3.3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis	100	129	100	100	100	100	100
3.3.1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	350	-	262	350	350	100	350
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SERTA SARANA PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN SESUAI KETENTUAN	100	0	100	100	100	100	100
4.1.	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan Dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	20	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.1.	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan Dan Optikak Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikak, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40	-	40	40	40	100	40
4.2.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT	100	-	100	100	100	100	100
4.2.1.	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	100	-	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2023)
						Target tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS (BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)	90	796,62	77	90	93	103	90
5.1.	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	329.000	10	323.908	329.000	338.097	103	329.000
5.1.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	2	-	2	2	2	100	2
5.2.	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Mandiri	46	6	45	46	76	165	46
5.2.1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	-	2	2	2	100	2

Berdasarkan tabel 3.16 Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023 terlihat capaian kinerja Program dan kegiatan yang sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan. Adanya perumpunan program dan kegiatan di tahun anggaran 2021 sehingga ada kolom realisasi program / kegiatan yang kosong (blok warna gelap dan strip) yang merupakan bagian dari perumpunan, sehingga target dan realisasi mengikuti tahun program dan kegiatan sesuai tahun perumpunan.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dinas Kesehatan didukung oleh 30 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 1 laboratorium kesehatan, 27 puskesmas sebagai Unit Organisasi bersifat Fungsional (UOBF), dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah) sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK). Masing masing UPTD di berikan Kuasa pengguna anggaran sehingga proses perencanaan dan realisasi anggaran dilaksanakan langsung oleh UPTD. Pendapatan Dinas Kesehatan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang sah Tahun Anggaran 2023 yang bersumber pada hasil retribusi Laboratorium kesehatan, BLUD puskesmas dan BLUD rumah sakit. Urusan Dinas Kesehatan menargetkan pendapatan sejumlah Rp. 227.951.450.860,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 247.161.447.198,00 (108,43%). Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022, maka tahun 2023 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 28.123.309.490,20 atau 11,38% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 219.038.137.707,80. Rincian target dan realisasi pendapatan Dinas kesehatan tahun 2022 tersaji dalam tabel 3.17 berikut :

Tabel 3. 17
Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Retribusi	158.400.000,00	172.274.000,00	108,76	162.251.000,00
2	Lain-lain PAD yang sah	227.793.050.860,00	246.989.173.198,00	108,43	218.875.886.707,80
Jumlah 1 + 2		227.951.450.860,00	247.161.447.198,00	108,43	219.038.137.707,80

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 2023

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan Dinas Kesehatan dijelaskan sebagai berikut:

2. Hasil Retribusi

Tahun 2023, Hasil Retribusi ditargetkan sejumlah Rp. 158.400.000,00 dengan Realisasi Hasil Retribusi sebesar Rp. 172.274.000,00 (108,76%). Realisasi hasil retribusi telah melebihi target pendapatan dan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 13.874.000,00 atau 8,76% dibandingkan pendapatan pada tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 162.251.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah didapatkan dari hasil pendapatan BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas. Pendapatan Tahun 2023 ditargetkan sejumlah Rp. 227.793.050.860,00 dengan Realisasi Hasil BLUD sebesar Rp. 246.989.173.198,00 (108,43%). Realisasi pendapatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pendapatan sejumlah Rp. 19.196.122.338,00 atau 8,43% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 dengan realiasi pendapatan sebesar Rp. 218.875.886.707,80.

Anggaran belanja pada Tahun 2023 sebesar Rp. 538.152.510.670,09. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 513.793.540.225,00 atau sebesar 95,47%. Rekapitulasi anggaran belanja dan realisasi belanja anggaran Dinas kesehatan tahun 2023 tersaji dalam tabel 3.18 berikut :

Tabel 3. 18
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	538.152.510.670,09	513.793.540.225,00	95,47	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	538.152.510.670,09	513.793.540.225,00	95,47	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	405.459.049.692,09	386.223.904.902,00	95,26	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000,00	154.807.850,00	96,75	

NO	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
1.1.1.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	45.000.000,00	41.844.250,00	92,99	
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	19.216.100,00	96,08	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000,00	19.066.100,00	95,33	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	74.681.400,00	99,58	
1.2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	121.020.963.200,00	117.499.984.551,00	97,09	
1.2.1.	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	111.688.191.000,00	108.951.955.791,00	97,55	
1.2.2.	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	9.045.082.200,00	8.268.007.526,00	91,41	
1.2.3.	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	287.690.000,00	280.021.234,00	97,33	
1.4.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	19.010.000,00	7.143.000,00	37,57	
1.4.1.	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	19.010.000,00	7.143.000,00	37,57	
1.5	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	284.800.000,00	271.627.926,00	95,37	
1.5.1.	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	25.000.000,00	18.290.000,00	73,16	
1.5.2.	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	259.800.000,00	253.337.926,00	97,51	
1.6	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	706.011.500,00	605.089.949,00	85,71	
1.6.1.	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.000.000,00	4.761.000,00	47,61	
1.6.2.	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	213.788.200,00	203.233.940,00	95,06	
1.6.3.	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	39.570.600,00	35.320.500,00	89,26	
1.6.4.	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	43.781.200,00	40.587.200,00	92,70	
1.6.5.	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	12.000.000,00	11.640.000,00	97,00	
1.6.6.	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	22.300.000,00	21.831.000,00	97,90	
1.6.7.	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	354.571.500,00	277.870.309,00	78,37	

NO	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
1.6.8.	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	10.000.000,00	9.846.000,00	98,46	
1.7.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.722.802.300,00	2.614.347.043,00	96,02	
1.7.1.	<i>Pengadaan Mebel</i>	170.303.500,00	151.270.000,00	88,82	
1.7.2.	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	835.498.800,00	772.433.523,00	92,45	
1.7.3.	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1.642.000.000,00	1.620.312.520,00	98,68	
1.7.4.	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	50.000.000,00	49.379.000,00	98,76	
1.7.5.	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	25.000.000,00	20.952.000,00	83,81	
1.8.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.776.200.000,00	2.325.646.740,00	83,77	
1.8.1.	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.8.2.	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</i>	2.738.600.000,00	2.288.960.800,00	83,58	
1.8.3.	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	33.600.000,00	32.685.940,00	97,28	
1.9.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	613.900.000,00	577.589.831,00	94,09	
1.9.1.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	20.000.000,00	10.451.000,00	52,26	
1.9.2.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	156.060.000,00	152.463.061,00	97,70	
1.9.3.	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.9.4.	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	50.640.000,00	47.394.000,00	93,59	
1.9.5.	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	85.200.000,00	81.444.000,00	95,59	
1.9.6.	<i>Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	75.000.000,00	67.725.300,00	90,30	

NO	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
1.9.7.	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	225.000.000,00	216.112.470,00	96,05	
1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	277.155.362.692,09	262.167.668.012,00	94,59	
1.10.1	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	277.155.362.692,09	262.167.668.012,00	94,59	
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	128.283.149.778,00	123.213.794.602,00	96,05	
2.1.	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	32.923.130.514,00	32.212.092.431,00	97,84	
2.1.1.	<i>Pengembangan Puskesmas</i>	2.040.000.000,00	2.030.428.600,00	99,53	
2.1.2.	<i>Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	500.000.000,00	489.054.365,00	97,81	
2.1.3.	<i>Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan</i>	252.000.000,00	230.041.423,00	91,29	
2.1.4.	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	27.358.036.814,00	27.025.095.103,00	98,78	
2.1.5.	<i>Pengadaan Obat Vaksin</i>	2.159.817.700,00	1.852.467.940,00	85,77	
2.1.6.	<i>Pengadaan Bahan Habis Pakai</i>	613.276.000,00	585.005.000,00	95,39	
2.2.	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	94.593.241.964,00	90.244.668.835,00	95,40	
2.2.1.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	2.531.929.200,00	2.513.774.400,00	99,28	
2.2.2.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	1.100.383.000,00	981.371.905,00	89,18	
2.2.3.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	1.385.991.100,00	1.184.844.350,00	85,49	
2.2.4.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	1.449.172.000,00	1.445.574.800,00	99,75	
2.2.5.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	1.445.993.000,00	1.415.330.700,00	97,88	
2.2.6.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	4.729.569.500,00	4.432.196.721,00	93,71	
2.2.7.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	457.506.300,00	454.545.800,00	99,35	

NO	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
2.2.8.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	200.000.000,00	199.646.100,00	99,82	
2.2.9.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>	72.200.000,00	71.634.450,00	99,22	
2.2.10.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	260.280.000,00	258.315.950,00	99,25	
2.2.11.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>	1.722.531.000,00	961.991.900,00	55,85	
2.2.12.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	720.938.100,00	710.804.984,00	98,59	
2.2.13.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	960.308.000,00	806.479.308,00	83,98	
2.2.14.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	8.534.999.230,00	6.813.280.300,00	79,83	
2.2.15.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	479.820.000,00	466.133.400,00	97,15	
2.2.16.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	1.384.421.400,00	1.328.896.000,00	95,99	
2.2.17.	<i>Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan</i>	2.043.359.300,00	2.003.156.354,00	98,03	
2.2.18.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	25.000.000,00	22.550.000,00	90,20	
2.2.19.	<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	50.000.000,00	49.421.500,00	98,84	
2.2.20.	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	212.570.000,00	210.597.950,00	99,07	
2.2.21.	<i>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</i>	153.165.000,00	145.064.250,00	94,71	
2.2.22.	<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	4.964.230.370,00	4.766.905.490,00	96,03	
2.2.23.	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	51.504.310.700,00	51.438.700.100,00	99,87	
2.2.24.	<i>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</i>	30.000.000,00	29.960.000,00	99,87	
2.2.25.	<i>Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	90.133.000,00	88.458.400,00	98,14	

NO	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
2.2.26.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.834.081.000,00	1.773.517.453,00	96,70	
2.2.27.	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.706.452.000,00	3.212.783.120,00	86,68	
2.2.28.	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	232.230.000,00	207.666.100,00	89,42	
2.2.29.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (Satuan: Unit)	398.771.000,00	393.922.900,00	98,78	
2.2.30.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	30.000.000,00	29.489.000,00	98,30	
2.2.31.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	64.039.000,00	62.003.600,00	96,82	
2.2.32.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.357.940.264,00	1.355.050.200,00	99,79	
2.2.33.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	120.000.000,00	112.932.700,00	94,11	
2.2.34.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	48.810.000,00	35.327.000,00	72,38	
2.2.35.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	50.000.000,00	48.199.600,00	96,40	
2.2.36.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	92.108.500,00	67.828.900,00	73,64	
2.2.37.	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	150.000.000,00	146.313.150,00	97,54	
2.3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	502.686.300,00	495.058.286,00	98,48	
2.3.1.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	
2.3.2.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	123.862.000,00	119.718.786,00	96,65	
2.3.3.	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	153.824.300,00	150.339.500,00	97,73	
2.4.	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	264.091.000,00	261.975.050,00	99,20	
2.4.1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	128.091.000,00	126.456.150,00	98,72	

NO	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
2.4.2.	<i>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	136.000.000,00	135.518.900,00	99,65	
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.238.430.000,00	2.181.254.978,00	97,45	
3.1.	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	
3.1.1.	<i>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
3.1.2.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
3.2.	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	500.000.000,00	475.942.300,00	95,19	
3.2.1.	<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
3.2.2.	<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
3.2.3.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	400.000.000,00	375.942.300,00	93,99	
3.3.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.673.430.000,00	1.640.312.678,00	98,02	
3.3.1.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.673.430.000,00	1.640.312.678,00	98,02	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	468.140.000,00	453.532.000,00	96,88	
4.1	<i>Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	81.575.100,00	78.996.400,00	96,84	

NO	Nama Urusan dan Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
4.1.1.	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	81.575.100,00	78.996.400,00	96,84	
4.2.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	386.564.900,00	374.535.600,00	96,89	
4.2.1.	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	386.564.900,00	374.535.600,00	96,89	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.703.741.200,00	1.585.216.790,00	93,04	
5.1.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	856.304.000,00	824.368.490,00	96,27	
5.1.1.	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	856.304.000,00	824.368.490,00	96,27	
5.2.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	847.437.200,00	760.848.300,00	89,78	
5.2.1	<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	847.437.200,00	760.848.300,00	89,78	

Realisasi anggaran program dan kegiatan tersaji pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3. 19
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023

NO	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	525.019.211.151,09	538.152.510.670,09	13.133.299.519,00	2,50	513.793.540.225,00	95,47
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	525.019.211.151,09	538.152.510.670,09	13.133.299.519,00	2,50	513.793.540.225,00	95,47
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	392.925.750.173,09	405.459.049.692,09	12.533.299.519,00	3,19	386.223.904.902,00	95,26
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	154.807.850,00	96,75
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	41.844.250,00	92,99
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	19.216.100,00	96,08
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	19.066.100,00	95,33
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	74.681.400,00	99,58
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121.020.963.200,00	121.020.963.200,00	0,00	0,00	117.499.984.551,00	97,09
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	111.688.191.000,00	111.688.191.000,00	0,00	0,00	108.951.955.791,00	97,55
1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.045.082.200,00	9.045.082.200,00	0,00	0,00	8.268.007.526,00	91,41
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	287.690.000,00	287.690.000,00	0,00	0,00	280.021.234,00	97,33
1.4.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.010.000,00	19.010.000,00	0,00	0,00	7.143.000,00	37,57
1.4.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.010.000,00	19.010.000,00	0,00	0,00	7.143.000,00	37,57
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	284.800.000,00	284.800.000,00	0,00	0,00	271.627.926,00	95,37
1.5.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	18.290.000,00	73,16
1.5.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	259.800.000,00	259.800.000,00	0,00	0,00	253.337.926,00	97,51
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.011.500,00	706.011.500,00	0,00	0,00	605.089.949,00	85,71

NO	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	4.761.000,00	47,61
1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.788.200,00	213.788.200,00	0,00	0,00	203.233.940,00	95,06
1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.570.600,00	39.570.600,00	0,00	0,00	35.320.500,00	89,26
1.6.4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.781.200,00	43.781.200,00	0,00	0,00	40.587.200,00	92,70
1.6.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	11.640.000,00	97,00
1.6.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	21.831.000,00	97,90
1.6.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.571.500,00	354.571.500,00	0,00	0,00	277.870.309,00	78,37
1.6.8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	9.846.000,00	98,46
1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.562.802.300,00	2.722.802.300,00	160.000.000,00	6,24	2.614.347.043,00	96,02
1.7.1.	Pengadaan Mebel	38.317.800,00	170.303.500,00	131.985.700,00	344,45	151.270.000,00	88,82
1.7.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	807.484.500,00	835.498.800,00	28.014.300,00	3,47	772.433.523,00	92,45
1.7.3.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.642.000.000,00	1.642.000.000,00	0,00	0,00	1.620.312.520,00	98,68
1.7.4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	49.379.000,00	98,76
1.7.5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	20.952.000,00	83,81
1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.776.200.000,00	2.776.200.000,00	0,00	0,00	2.325.646.740,00	83,77
1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100,00
1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	2.738.600.000,00	2.738.600.000,00	0,00	0,00	2.288.960.800,00	83,58
1.8.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	32.685.940,00	97,28
1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.900.000,00	613.900.000,00	-160.000.000,00	-20,67	577.589.831,00	94,09
1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	10.451.000,00	52,26

NO	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.060.000,00	156.060.000,00	0,00	0,00	152.463.061,00	97,70
1.9.3.	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00
1.9.4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00	47.394.000,00	93,59
1.9.5.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00	81.444.000,00	95,59
1.9.6.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000,00	75.000.000,00	-160.000.000,00	-68,09	67.725.300,00	90,30
1.9.7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	216.112.470,00	96,05
1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	264.622.063.173,09	277.155.362.692,09	12.533.299.519,00	4,74	262.167.668.012,00	94,59
1.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	264.622.063.173,09	277.155.362.692,09	12.533.299.519,00	4,74	262.167.668.012,00	94,59
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	127.541.123.778,00	128.283.149.778,00	742.026.000,00	0,58	123.213.794.602,00	96,05
2.1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.923.130.514,00	32.923.130.514,00	0,00	0,00	32.212.092.431,00	97,84
2.1.1.	Pengembangan Puskesmas	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	0,00	0,00	2.030.428.600,00	99,53
2.1.2.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	489.054.365,00	97,81
2.1.3.	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	230.041.423,00	91,29
2.1.4.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.358.036.814,00	27.358.036.814,00	0,00	0,00	27.025.095.103,00	98,78
2.1.5.	Pengadaan Obat Vaksin	2.159.817.700,00	2.159.817.700,00	0,00	0,00	1.852.467.940,00	85,77
2.1.6.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	613.276.000,00	613.276.000,00	0,00	0,00	585.005.000,00	95,39
2.2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.851.215.964,00	94.593.241.964,00	742.026.000,00	0,79	90.244.668.835,00	95,40
2.2.1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.531.929.200,00	2.531.929.200,00	0,00	0,00	2.513.774.400,00	99,28
2.2.2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.100.383.000,00	1.100.383.000,00	0,00	0,00	981.371.905,00	89,18
2.2.3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.385.991.100,00	1.385.991.100,00	0,00	0,00	1.184.844.350,00	85,49
2.2.4.	Pengelolaan Pelayanan	1.449.172.000,00	1.449.172.000,00	0,00	0,00	1.445.574.800,00	99,75

NO	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
	Kesehatan Balita						
2.2.5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.445.993.000,00	1.445.993.000,00	0,00	0,00	1.415.330.700,00	97,88
2.2.6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.729.569.500,00	4.729.569.500,00	0,00	0,00	4.432.196.721,00	93,71
2.2.7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	457.506.300,00	457.506.300,00	0,00	0,00	454.545.800,00	99,35
2.2.8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	199.646.100,00	99,82
2.2.9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00	0,00	71.634.450,00	99,22
2.2.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	260.280.000,00	260.280.000,00	0,00	0,00	258.315.950,00	99,25
2.2.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.722.531.000,00	1.722.531.000,00	0,00	0,00	961.991.900,00	55,85
2.2.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	720.938.100,00	720.938.100,00	0,00	0,00	710.804.984,00	98,59
2.2.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.161.653.000,00	960.308.000,00	-201.345.000,00	-17,33	806.479.308,00	83,98
2.2.14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.934.999.230,00	8.534.999.230,00	600.000.000,00	7,56	6.813.280.300,00	79,83
2.2.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	479.820.000,00	479.820.000,00	0,00	0,00	466.133.400,00	97,15
2.2.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.384.421.400,00	1.384.421.400,00	0,00	0,00	1.328.896.000,00	95,99
2.2.17.	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	2.043.359.300,00	2.043.359.300,00	0,00	0,00	2.003.156.354,00	98,03
2.2.18.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	22.550.000,00	90,20
2.2.19.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	49.421.500,00	98,84
2.2.20.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	212.570.000,00	212.570.000,00	0,00	0,00	210.597.950,00	99,07
2.2.21.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	153.165.000,00	153.165.000,00	0,00	0,00	145.064.250,00	94,71
2.2.22.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.894.447.370,00	4.964.230.370,00	69.783.000,00	1,43	4.766.905.490,00	96,03
2.2.23.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	51.504.310.700,00	51.504.310.700,00	0,00	0,00	51.438.700.100,00	99,87
2.2.24.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	29.960.000,00	99,87

NO	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
2.2.25.	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	90.133.000,00	90.133.000,00	0,00	0,00	88.458.400,00	98,14
2.2.26.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.834.081.000,00	1.834.081.000,00	0,00	0,00	1.773.517.453,00	96,70
2.2.27.	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.432.864.000,00	3.706.452.000,00	273.588.000,00	7,97	3.212.783.120,00	86,68
2.2.28.	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	232.230.000,00	232.230.000,00	0,00	0,00	207.666.100,00	89,42
2.2.29.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (Satuan: Unit)	398.771.000,00	398.771.000,00	0,00	0,00	393.922.900,00	98,78
2.2.30.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	29.489.000,00	98,30
2.2.31.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	64.039.000,00	64.039.000,00	0,00	0,00	62.003.600,00	96,82
2.2.32.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.357.940.264,00	1.357.940.264,00	0,00	0,00	1.355.050.200,00	99,79
2.2.33.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	112.932.700,00	94,11
2.2.34.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	48.810.000,00	48.810.000,00	0,00	0,00	35.327.000,00	72,38
2.2.35.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	48.199.600,00	96,40
2.2.36.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	92.108.500,00	92.108.500,00	0,00	0,00	67.828.900,00	73,64
2.2.37.	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	146.313.150,00	97,54
2.3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	502.686.300,00	502.686.300,00	0,00	0,00	495.058.286,00	98,48
2.3.1.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	100,00
2.3.2.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	123.862.000,00	123.862.000,00	0,00	0,00	119.718.786,00	96,65
2.3.3.	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	153.824.300,00	153.824.300,00	0,00	0,00	150.339.500,00	97,73
2.4.	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	264.091.000,00	264.091.000,00	0,00	0,00	261.975.050,00	99,20
2.4.1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	128.091.000,00	128.091.000,00	0,00	0,00	126.456.150,00	98,72
2.4.2.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00	135.518.900,00	99,65

NO	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.238.430.000,00	2.238.430.000,00	0,00	0,00	2.181.254.978,00	97,45
3.1.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	100,00
3.1.1.	<i>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	100,00
3.1.2.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00
3.2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	475.942.300,00	95,19
3.2.1.	<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00
3.2.2.	<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00
3.2.3.	<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	375.942.300,00	93,99
3.3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.673.430.000,00	1.673.430.000,00	0,00	0,00	1.640.312.678,00	98,02
3.3.1.	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.673.430.000,00	1.673.430.000,00	0,00	0,00	1.640.312.678,00	98,02
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	468.140.000,00	468.140.000,00	0,00	0,00	453.532.000,00	96,88
4.1	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81.575.100,00	81.575.100,00	0,00	0,00	78.996.400,00	96,84
4.1.1.	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	81.575.100,00	81.575.100,00	0,00	0,00	78.996.400,00	96,84

NO	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2023	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2023	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
4.2.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	386.564.900,00	386.564.900,00	0,00	0,00	374.535.600,00	96,89
4.2.1.	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	386.564.900,00	386.564.900,00	0,00	0,00	374.535.600,00	96,89
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.845.767.200,00	1.703.741.200,00	-142.026.000,00	-7,69	1.585.216.790,00	93,04
5.1.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	856.304.000,00	856.304.000,00	0,00	0,00	824.368.490,00	96,27
5.1.1.	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	856.304.000,00	856.304.000,00	0,00	0,00	824.368.490,00	96,27
5.2.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	989.463.200,00	847.437.200,00	-142.026.000,00	-14,35	760.848.300,00	89,78
5.2.1	<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	989.463.200,00	847.437.200,00	-142.026.000,00	-14,35	760.848.300,00	89,78

BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai fungsi untuk Penyusunan kebijakan bidang kesehatan, Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, Pelaksanaan evaluasi, pelaporan bidang kesehatan, dan Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tahun 2023 melaporkan bahwa rata-rata capaian kinerja program sebesar 100,75% dan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,47%. Berdasarkan rumusan penghitungan efisiensi dan efektifitas terhadap capaian program dan anggaran maka dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 15,25% dan tingkat efektifitas sebesar 115,95% jadi pelaksanaan anggaran dan program dan kegiatan Dinas kesehatan **Sudah efektif dan sangat efisien**. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Demak telah melaksanakan tugas pokoknya secara optimal.

4.2 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Rencana Strategi yang telah diidentifikasi serta dikaji berdasarkan pengumpulan data bersama Tim Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Nomor 440/125/2023 tentang penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023 guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Alokasi Pembiayaan Pembangunan Kesehatan melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan public, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan, dan responsibility dalam pemberian informasi.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan kualitas pelayanan Puskesmas PONEK dan RS PONEK.
4. Menurunkan penyakit menular dan tidak menular melalui peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular, penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dan penguatan survailans penyakit dan mutu serta cakupan imunisasi;

5. Meningkatkan status gizi melalui pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk, cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat, serta deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD;
6. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan melalui pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan primer dan rujukan, sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya, dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan serta pelayanan laboratorium kesehatan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, tugas belajar, kursus, bimbingan teknik program, dan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan
8. Meningkatkan Jaminan akses pelayanan kesehatan dengan Premi asuransi pembiayaan kesehatan masyarakat;
9. Meningkatkan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS dengan sosialisasi dan advokasi regulasi upaya promotif dan preventif melalui GERMAS, serta Pembuatan dan penyebaran informasi melalui berbagai media.
10. Meningkatkan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat
11. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta melalui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dibidang kesehatan dan optimalisasi UKBM (Posyandu, Posbindu, SBH, PKK, ormas keagamaan

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 untuk perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 . SK TIM MONEY



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515

Telepon(0291)-685934 Faksimili (0291)-685934

<http://dinkes.demakkab.go.id>; e-mail:dinkes@dinkes.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 440/ 125 /2023

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023, perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023;
- b. bahwa penetapan tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023 sebagaimana dimaksud huruf a. perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023
- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023, dengan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lingkup Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023, adalah sebagai berikut :
- a. Mengkaji seluruh peraturan, Pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023;
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan data dan mengolah data yang diperlukan guna melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023;
 - c. Membahas, mendiskusikan, merumuskan masalah serta solusi pemecahan masalah dan membuat Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Demak
Pada tanggal : 12 Januari 2023.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 NOMOR : 440/ 125 / 2023
 TANGGAL : 12 Januari 2023.

TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	
		TIM	DINAS
1	dr. Ali Maimun, M.Kes	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan
2	Nani Amrin, SKM, M.Kes	Anggota	Sekretaris Dinas Kesehatan
3	Sri Puji Astutik, Skm, M. Kes	Anggota	Kabid Kesehatan Masyarakat
4	Heri Winarno,SKM, M.kes	Anggota	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5	dr. Anggoro Karya Adisarsono	Anggota	Kabid Sumber Daya Kesehatan
6	Dian Arisanti, S.Si.Apt, MH.Kes.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN DEMAK



dr. Ali Maimun, M.Kes
 Pemula Tingkat I
 NIP. 197104102002121007

LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA ESELON 2 DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon (0291) 685934 Faximile (0291) 685934
<http://www.demakkab.go.id> ; e-mail: dinkes@dkes.demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, dr. ALI MAIMUN, SKM, M. Kes, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

- BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
- TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
- BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
- MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
- SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
- AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
- BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 19 Januari 2023

Menyaksikan :

BUPATI DEMAK,

dr. H. EISTI'ANAH, S.E.

Pembuat Pernyataan,

dr. ALI MAIMUN, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710410 200212 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon (0291) 685934 Faximile (0291) 685934
<http://www.demakkab.go.id> ; e-mail: dinkes@dkes.demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ALI MAIMUN, M. Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. EISTI'ANAH, S.E.
Jabatan : Bupati Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 19 Januari 2023

Pihak Kedua,

dr. H. EISTI'ANAH, S.E.

Pihak Pertama,

dr. ALI MAIMUN, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710410 200212 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,33
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100%
3.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,54 tahun
3.1	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)	4,9 98
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	93,1%
3.3	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	45,5%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Rp. 361.013.504.863,00	APBD, DID
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 126.433.110.800,00	APBD, DID, DAK Non Fisik, DAK Fisik, DBHCHT, Pajak Rokok
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.531.578.000,00	APBD, DAK Non Fisik
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp. 468.140.000,00	APBD, DAK Non Fisik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.330.443.200,00	APBD, DAK Non Fisik

BUPATI DEMAK
dr. H. EISTI'ANAH, S.E.

Demak, 19 Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK

dr. ALI MAIMUN, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710410 200212 1 007

LAMPIRAN 3 : FOTO - FOTO KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA TAHUN 2023

1) Pencegahan penyakit menular dan tidak menular



Sosialisasi dan Skrining HIV/AIDS



Skrining Hepatitis



Kegiatan Posbindu



Sosialisasi Dan Skrining Malaria



Kegiatan PSN DBD



Kegiatan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)

2) Kegiatan dalam Upaya peningkatan Gizi, Pencegahan Gizi Buruk, Pencegahan AKI dan AKB.



Pendampingan Ibu Hamil Risti



Pelayanan Rumah Gizi Balita



Monitoring PMT Lokal



Kegiatan Peduli Stunting bersama Polres Demak



Pelayanan KB Pasca Salin bersama tim BKKBN RI



Peningkatan Peran PKK dan Kader dalam Pencegahan dan penurunan AKI, AKB, dan Stunting

3) Kegiatan dalam upaya Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan.



Kegiatan Visitasi Perpanjangan Apotek bersama Tim Dinkes dan Dinpmptsp



Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Apotek



Visitasi Perpanjangan Klinik



Visitasi RS dalam proses perpanjangan operasional

4) Kegiatan Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS.



Peregangan bersama pada jam kerja
di Lingkungan Dinkes



SENAM GERMAS Bersama
di lingkungan Dinas Kesehatan



Senam Bersama dalam peringatan hari Lansia ke 27 di
Kabupaten Demak



Kegiatan Rockport sebagai Pengukuran tingkat
kebugaran

5) Peningkatan Mutu pelayanan dan Optimalisasi sumberdaya manusia yang ada.



Peningkatan Mutu Puskesmas



Pelaksanaan Uji Kredensial Dokter Gigi



Survey Penilaian Akreditasi Puskesmas



Koordinasi penguatan sistem rujukan DES PSC119

LAMPIRAN 4 : DAFTAR PRESTASI

NO	PRESTASI	TAHUN
	TINGKAT NASIONAL	
1	Peringkat Pertama Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik Kategori Dinas Kesehatan Kab/Kota Oleh Menteri Kesehatan RI	2023
2	Penghargaan SWASTI SABA PADAPA sebagai Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023 dari Menteri Kesehatan RI	2023
3	Sertifikat Terakreditasi sebagai Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dari Kementerian Kesehatan	2023
	TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH	
4	Penghargaan sebagai Pengelolaan Program Surveilens dan Imunisasi Terbaik	2023
5	Juara Terbaik kedua Puskesmas Bersih	2023
6	Juara Terbaik Kedua Pangkalan Saka Bhakti Husada	2023
7	Piagam Penghargaan Pelaporan Posyandu Aktif Provinsi Jawa Tengah	2023
8	Peringkat kedua Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kategori Tenaga Kesehatan di Puskesmas (Dokter Gigi)	2023
	TINGKAT KABUPATEN	
9	Perangkat Daerah dengan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Tertinggi	2023
10	Peringkat 5 Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Demak Tahun 2023	2023

LAMPIRAN 5 : DATA KEMATIAN BAYI

DATA DUKUNG REALISASI KINERJA INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

NO	Puskesmas	Lahir Hidup		Σ Lahir hidup	Σ Lahir mati	Kematian Neonatal			Sebab Kematian Neonatal							Σ Kematian Bayi (29 hr - 11 bln)	Sebab Kematian Bayi					
		<2500gr	>2500gr			Σ Kematian 0-7 hari	Σ Kematian 8-28 hari	Jumlah Kematian Neonatal	BBLR/ PREMATUR	Asfiksia	TN	Sepsis	Kelainan Kongenital	Ikterus	Lain-lain		Pneumonia	Diare	Kelainan Saluran cerna	Tetanus	Kelainan Saraf	Lain-lain
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	MRANGGEN I	6	945	951	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
2	MRANGGEN II	13	914	927	1	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MRANGGEN III	15	840	855	0	3	1	4	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	KARANGAWEN I	16	691	707	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KARANGAWEN II	34	829	863	4	5	1	6	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	GUNTUR I	41	751	792	2	5	2	7	3	4	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1
7	GUNTUR II	28	598	626	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8	SAYUNG I	27	559	586	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
9	SAYUNG II	17	841	858	0	1	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	BONANG I	23	958	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KARANGTENGAH	26	1119	1145	1	0	4	4	3	1			0		0	2						2
12	BONANG II	19	806	825	2	2	0	2		1			1		0	1						1
13	DEMAK I	8	590	598	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DEMAK II	16	445	461	3	3		3		2			1			0						
15	DEMAK III	19	578	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	WONOSALAM I	6	627	633	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	WONOSALAM II	26	611	637	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	DEMPET	38	803	841	3	4	0	4	0	2	0	0	1	0	1	3	0	1	0	0	0	2

NO	Puskesmas	Lahir Hidup		Σ Lahir hidup	Σ Lahir mati	Kematian Neonatal			Sebab Kematian Neonatal							Σ Kematian Bayi (29 hr - 11 bln)	Sebab Kematian Bayi					
		<2500gr	>2500gr			Σ Kematian 0-7 hari	Σ Kematian 8-28 hari	Jumlah Kematian Neonatal	BBLR/ PREMATUR	Asfiksia	TN	Sepsis	Kelainan Kongenital	Ikterus	Lain-lain		Pneumonia	Diare	Kelainan Saluran cerna	Tetanus	Kelainan Saraf	Lain-lain
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	KEBONAGUNG	296	269	565	0	2	0	2	2							2						2
20	GAJAH I	20	480	500	2	3	1	4	2	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	2
21	GAJAH II	6	335	341	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KARANGANYAR I	8	477	485	1	2	2	4	1	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
23	KARANGANYAR II	16	624	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
24	MIJEN I	16	454	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
25	MIJEN II	8	448	456	1	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	WEDUNG I	20	855	875	2	2	1	3	1				1		1	3						3
27	WEDUNG II	19	550	569	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3
	TOTAL	787	17997	18784	33	38	23	61	24	27	0	1	10	0	8	31	2	3	0	0	0	26

LAMPIRAN 6: DATA KEMATIAN IBU

NO	PUSKESMAS	PENYEBAB KEMATIAN IBU TAHUN 2023								
		PERDARAHAN	GANGGUAN HIPERTENSI	INFEKSI	KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	GANGGUAN AUTOIMUN	GANGGUAN CEREBROVASKULAR	KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS)	LAIN-LAIN	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	Mranggen I	1								1
2	Mranggen II	2								2
3	Mranggen III									0
4	Karangawen I					1				1
5	Karangawen II		1						1 (CKD)	2
6	Guntur I								1	1
7	Guntur II									0
8	Sayung I		1							1
9	Sayung II									0
10	Karangtengah									0
11	Bonang I									0
12	Bonang II									0
13	Demak I									0
14	Demak II									0
15	Demak III									0
16	Wonosalam I									0
17	Wonosalam II									0
18	Dempet									0
19	Kebonagung	1								1
20	Gajah I				1				1	2
21	Gajah II									0
22	Karanganyar I									0
23	Karanganyar II									0
24	Mijen I		1							1
25	Mijen II									0
26	Wedung I									0
27	Wedung II									0
TOTAL		4	3	0	1	1	0	0	2	12

LAMPIRAN 7: DATA DESA SIAGA AKTIF MANDIRI

DATA PERKEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

NO	PUSKESMAS	JUMLAH DESA DAN KELURAHAN	STRATA DESA/KEL SIAGA AKTIF										FKD			
			JUMLAH DESA/KEL SIAGA	% DESA/KEL SIAGA	PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		TERBENTUK		AKTIF	
					JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Bonang 1	11	11	100%	0	0%	0	0%	3	27%	8	73%	11	100%	11	100%
2	Bonang 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	3	30%	7	70%	10	100%	10	100%
3	Demak 1	6	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	6	100%	6	100%	6	100%
4	Demak 2	7	7	100%	0	0%	0	0%	2	29%	5	71%	7	100%	7	100%
5	Demak 3	6	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	6	100%	6	100%	6	100%
6	Dempet	16	16	100%	0	0%	0	0%	6	38%	10	63%	16	100%	16	100%
7	Gajah 1	10	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%
8	Gajah 2	8	8	100%	0	0%	0	0%	3	38%	5	63%	8	100%	8	100%
9	Guntur 1	10	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%
10	Guntur 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%
11	Karanganyar 1	9	9	100%	0	0%	0	0%	0	0%	9	100%	9	100%	9	100%
12	Karanganyar 2	8	8	100%	0	0%	0	0%	1	13%	7	88%	8	100%	8	100%
13	Karangawen 1	6	6	100%	0	0%	0	0%	3	50%	3	50%	6	100%	3	50%
14	Karangawen 2	6	6	100%	0	0%	0	0%	1	17%	5	83%	6	100%	6	100%
15	Karagtengah	17	17	100%	0	0%	0	0%	0	0%	17	100%	17	100%	17	100%
16	Kebonagung	14	14	100%	0	0%	0	0%	2	14%	12	86%	14	100%	14	100%
17	Mijen 1	9	9	100%	0	0%	0	0%	0	0%	9	100%	9	100%	9	100%
18	Mijen 2	6	6	100%	0	0%	0	0%	2	33%	4	67%	6	100%	6	100%
19	Mranggen 1	7	7	100%	0	0%	1	14%	1	14%	5	71%	7	100%	7	100%
20	Mranggen 2	9	9	100%	0	0%	0	0%	2	22%	7	78%	9	100%	9	100%
21	Mranggen 3	3	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%	3	100%
22	Sayung 1	10	10	100%	0	0%	0	0%	3	30%	7	70%	10	100%	10	100%
23	Sayung 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	4	40%	6	60%	10	100%	10	100%
24	Wedung 1	10	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%
25	Wedung 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	2	20%	8	80%	10	100%	10	100%
26	Wonosalam 1	11	11	100%	0	0%	0	0%	0	0%	11	100%	11	100%	11	100%
27	Wonosalam 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	4	40%	6	60%	8	80%	8	100%
	TOTAL	249	249	100%	0	0%	1	0%	42	17%	206	83%	249	100%	244	98%

LAMPIRAN 8: DATA STATUS AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN 2023

NO	NAMA FASYANKES	ALAMAT	STATUS AKREDITASI
1	MRANGGEN 1	Jl. Raya Mranggen 90, Kec. Mranggen	PARIPURNA
2	MRANGGEN 2	Jl. Raya Nggorawe, Kec. Mranggen	PARIPURNA
3	MRANGGEN 3	Jl. Pucang Gading Raya No. 54.Batu Sari, Kec. Mranggen	PARIPURNA
4	KARANGAWEN I	Jl. Raya Karangawen - Purwodadi Km 21, Kec. Karangawen	PARIPURNA
5	KARANGAWEN II	Ds. Tlogorejo, Kec.Karangawen	PARIPURNA
6	GUNTUR I	Jl. Raya Guntur, Kec.Guntur	PARIPURNA
7	GUNTUR II	Jl. Raya Pamongan - Genuk Ds. Pamongan, Kec.Guntur	PARIPURNA
8	SAYUNG I	Jl. Raya Semarang - Demak Ds. Purwosari , Kec.Sayung	PARIPURNA
9	SAYUNG II	Desa Tambakroto Kec. Sayung	PARIPURNA
10	KARANG TENGAH	Ds. Karangsari, Kec.Karang Tengah	PARIPURNA
11	BONANG I	Jl. Moro - Demak No. 50 , Kec. Bonang	PARIPURNA
12	BONANG II	Jl. Raya Demak - Wedung Km 10, Kec.Bonang	PARIPURNA
13	DEMAK I	Jl. Pemuda 38 No. 61 Kel Bintoro, Kec. Demak	PARIPURNA
14	DEMAK II	Jl. Raya Demak - Mijen , Kec. Demak	PARIPURNA
15	DEMAK III	Jl. Cempaka Raya No.5 Wijaya Kusuma II, Kec. Demak	PARIPURNA
16	WONOSALAM 2	Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam	PARIPURNA
17	WONOSALAM 1	Jl. Demak Purwodadi Km 5.5, Kec. Wonosalam	PARIPURNA
18	DEMPET	Jl. Raya Dempet . Dempet, Kec. Dempet	PARIPURNA
19	KEBONAGUNG	Jl. Raya Semarang Purwodadi Ds. Kebon Agung, Kec. Kebonagung	PARIPURNA
20	GAJAH 1	Jl. Raya Demak-Kudus No. 8 Ds. Gajah, Kec. Gajah	PARIPURNA
21	GAJAH 2	Ds. Tambirejo, Kec. Gajah	PARIPURNA
22	KARANGANYAR I	Ds. Raya Kudus-Demak Km 5 Ds. Karanganyar, Kec. Karanganyar	PARIPURNA
23	KARANGANYAR II	Jl. Raya Karanganyar-Mijen Ds. Kedungwaru Lor, Kec. Karanganyar	PARIPURNA
24	MIJEN I	Jl. Raya Mijen No. 68, Kec. Mijen	PARIPURNA
25	MIJEN II	Jl. Raya Jleper Ds. Jleper, Kec. Mijen	PARIPURNA
26	WEDUNG II	Jl. DR Azhari No. 04 Ds. Mutih Kulon, Kec. Wedung	PARIPURNA
27	WEDUNG I	Jl. Raya Angin-Angin No. 8, Kec. Wedung	PARIPURNA
28	RS Umum Daerah Sunan Kalijaga	Jl. Sultan Fatah, Bogorame , Bintoro, Demak	PARIPURNA
29	RSUD Sultan Fatah	Jl. Semarang - Purwodadi KM. 21 RT. 002 RW. 001, Pundenarum, Karangawen	PARIPURNA